



**PELAKSANAAN PERKAWINAN ANTARA
WANITA WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN TIONGHOA
DENGAN PRIA TAIWAN MELALUI PERANTARA
DAN AKIBAT HUKUMNYA DI KOTA JAMBI**

TESIS

Disusun
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2
Program Studi Magister Kenotariatan

Oleh :
BAMBANG HADINATA
B4B 007 030

PEMBIMBING:
H. Mulyadi, SH., MS.
Yunanto, SH., M.Hum.

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

© Bambang Hadinata 2009

LEMBAR PENGESAHAN

TESIS

**PELAKSANAAN PERKAWINAN ANTARA WANITA WARGA NEGARA
INDONESIA KETURUNAN TIONGHOA DENGAN PRIA TAIWAN
MELALUI PERANTARA DAN AKIBAT HUKUMNYA DI KOTA JAMBI**

Disusun Oleh :

**BAMBANG HADINATA
B4B 007 030**

**Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 7 Maret 2009**

Tesis ini telah diterima
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan

Pembimbing I

Pembimbing II

**H. MULYADI, SH. MS.
NIP. 130 529 429**

**YUNANTO, SH. M.Hum.
NIP. 131 689 627**

Mengetahui :

Ketua Program

**H. KASHADI, SH. MH.
NIP. 131 124 438**

KATA PENGANTAR

Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dan Sang Tiratana Buddha, Dhamma, dan Sangha, yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayah –Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang berjudul “ PELAKSANAAN PERKAWINAN ANTARA WANITA WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN TIONGHOA DENGAN PRIA TAIWAN MELALUI PERANTARA DAN AKIBAT HUKUMNYA DI KOTA JAMBI“ pada waktunya.

Penulisan Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memenuhi sebagian syarat – syarat untuk menyelesaikan Program Studi Magister Kenotariatan Strata Dua (S-2) pada program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro di Semarang.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih terdapat berbagai kekurangan, sehingga tidak menutup untuk menerima kritikan dan saran. Walaupun demikian penulis tetap berharap Tesis ini dapat memberikan manfaat baik bagi penulis, rekan mahasiswa serta semua pihak.

Tesis ini dapat diselesaikan penulis dengan baik berkat dukungan, bantuan serta bimbingan dari para pihak, sehingga pada kesempatan kali ini dengan penuh kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan kesempatan dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, yaitu kepada beliau :

1. Bapak Prof. Dr. dr. Susilo Wibowo, MS., Med., Sp., And., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.

2. Bapak Prof. Drs. Warella, MPA., Ph.D., selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak H. Kashadi, SH., MH., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak Dr.Budi Santoso, SH., MS., selaku Sekretaris I Bidang Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
5. Bapak Dr. Suteki, SH., M.Hum., selaku Sekretaris II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
6. Bapak H. Mulyadi, SH.,MS., selaku Dosen Pembimbing I, atas nasehat, saran dan waktu yang diberikan untuk perbaikan serta penyempurnaan Tesis ini.
7. Bapak Yunanto, SH., M.Hum., selaku Dosen pembimbing II, yang telah memberikan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
8. Tim Review Proposal dan Tim Penguji Tesis yang telah meluangkan waktu untuk meneliti kelayakan proposal dan menguji Tesis dalam rangka menyelesaikan Studi di Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
9. Bapak Suparno, SH., M.Hum., selaku Dosen Wali yang telah membantu penulis selama menempuh pendidikan di Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

10. Para Guru Besar, staff pengajar dan staff akademik Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan bantuan dalam menyelesaikan pendidikan di Universitas Diponegoro Semarang.
11. Bapak Abdullah Harris, SH., M.Hum., yang selalu memberikan motivasi dan dorongan serta memberikan keterangan dalam penulisan Tesis.
12. Ibu Sri Sudaryatmi, SH., M.Hum., yang selalu memberikan motivasi dan dorongan selama menempuh Pendidikan di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
13. Para Narasumber yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas bantuannya dan telah memberikan keterangan dalam penulisan tesis.
14. Kedua orang Tuaku yang sangat kucintai dan kubanggakan, Ayahanda Amir dan Ibunda Sioe Lan, yang tidak henti – hentinya memberikan Do'a, dorongan dan semangat yang tulus ikhlas dan kasih sayangnya sampai penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
15. Saudara kandung Heniwati serta suami Dorman, Herinawati, S.Kom, Ardy Putra dan Keponakanku yang lucu Roberto dan Jeslyin yang selalu memberikan bantuan serta dorongan dan Do'a yang tulus dan kasih sayangnya.

16. Rekan – rekan Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang angkatan 2007, atas persaudaraan dan persahabatan kalian selama ini.

17. Buat teman – teman kos Pleburan V / 7.

Akhir kata semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan bagi perkembangan hukum Perdata khususnya dalam bidang hukum Perkawinan.

Semarang, 7 Maret 2009

BAMBANG HADINATA

**PELAKSANAAN PERKAWINAN ANTARA
WANITA WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN TIONGHOA DENGAN
PRIA TAIWAN MELALUI PERANTARA
DAN AKIBAT HUKUMNYA DI KOTA JAMBI
Oleh : Bambang Hadinata**

ABSTRAK

Manusia dalam hidup bermasyarakat akan senantiasa dihadapkan pada suatu permasalahan hidup yang dihadapi oleh manusia yang satu dengan pribadi manusia yang lainnya tidaklah selalu sama, karena adanya perbedaan kepentingan maupun perbedaan situasi dan kondisi dari masing – masing individu di dalam masyarakat. Untuk menjaga agar jangan sampai terjadi pertentangan atau konflik antar individu di dalam masyarakat perlu adanya peraturan, baik peraturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis untuk menjaga ketertiban dalam kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan adanya peraturan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang mewajibkan setiap orang untuk mematuhi aturan – aturan yang ada, maka setiap orang tidak dapat bertindak menurut kehendaknya sendiri. Peraturan yang tidak tertulis yang sering disebut dengan istilah hukum adat maupun peraturan yang tertulis yang dipakai untuk mengatur hubungan antar manusia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di wilayah Negara Indonesia ini sudah ada. Demikian juga peraturan mengenai hubungan antar manusia yang satu dengan yang lainnya dalam kehidupan berkeluarga telah ada aturannya yaitu dengan dikeluarkannya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Data yang digunakan dalam metode ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara, dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka melalui studi dokumen. Penelitian ini menggunakan metode non random sampling, artinya tidak semua populasi diberi kesempatan untuk dijadikan sampel, sedangkan teknik pengambilan sampel menggunakan Purposive sampling yaitu berdasarkan tujuan tertentu dengan pertimbangan dan kriteria yang sudah ditentukan dalam penelitian yaitu 5 (lima) pasangan suami isteri yang melakukan perkawinan, perantara (makcomblang), ketua Pengadilan Negeri Jambi, 1 (satu) orang Pengacara dan pegawai pencatatan sipil Kota Jambi.

Berdasarkan penelitian diketahui bahwa, pertama perkawinan antara wanita Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa dengan pria Taiwan banyak dilakukan dibawah tangan, sehingga secara yuridis perkawinan tersebut tidak sah, karena tidak memenuhi syarat formal yaitu tidak dilakukan pencatatan perkawinan di kantor catatan sipil. Kedua saat ini belum ada jaminan perlindungan hukum terhadap para wanita Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa apabila mereka menjadi korban penipuan oleh perantara (makcomblang) dan pria Taiwan yang hanya memanfaatkan keuntungan wanita Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa yang berada pada posisi yang sangat lemah karena di bawah kekuasaan para perantara (makcomblang) dan pria Taiwan.

Kata kunci : Wanita Tionghoa dan Perlindungan Hukum.

THE PRACTICE OF MARRIAGE BETWEEN CHINESE DESCENDANT
INDONESIAN CITIZEN WOMEN AND TAIWANESE MEN THROUGH
MEDIATORS AND ITS LEGAL EFFECTS IN JAMBI CITY

By : Bambang Hadinata

ABSTRACT

In the societal life, human will always be faced to the matters of life, faced by a person with other human personalities, which are not always the same, due to the differences of interests and also differences of situations and conditions of each individuals in the society. In order to prevent disputes or conflicts among individuals in the society, regulations are necessary, whether they are written or unwritten regulations, to maintain orders in human's life related to societal, national, and state life. With the existence of regulations in the societal, national, and state life obliging everybody to obey the existing regulations, therefore, everybody cannot act according to his/her own heart's content. The unwritten regulations, frequently acknowledged as in the term of traditional laws, and also written regulations used to regulate the relationships among people in the societal, national, and state life in the region of the state of Indonesia do exist. Also, the regulations concerning the relationship of one person to the other in family lives have existed, by the legalization of Act Number 1 Year 1974 concerning Marriage and its executive regulation, which is Government Ordinance Number 9 Year 1975.

The data used in this research are primary data, which are data collected from the site by conducting interviews, and secondary data, which are data collected from literature materials by conducting a documentary study. This research uses a non-random sampling method, which means, not all population is given an opportunity to be sample; meanwhile, the technique of sample collection uses the purposive sampling technique based on a particular purpose with the considerations and criteria that have been established in this research, consisting of 5 (five) points: the couples of husbands and wives conducting the marriages, mediators (matchmakers), the chairman of the Court of First Instance in Jambi, 1 (one) lawyer, and officers of the vital statistic office in Jambi City.

Based on the research, it is found that: first, many of the marriages between Chinese descendant Indonesian Citizen women and Taiwanese men were conducted privately, thus, according to the juridical principle, those marriage are illegal because the do not fulfill formal requirements, in which, the are not registered to the vital statistic office. Second, up to now, there is no legal protection yet for the Chinese descendant Indonesian Citizen women if they become the victims of deception performed by the mediators (matchmakers) and Taiwanese men who use the benefits of the Chinese descendant Indonesian Citizen women who are in a very inferior position because they are under the power of mediators (matchmakers) and Taiwanese men.

Keywords: Chinese women and legal protection

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
PERNYATAAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Perumusan Masalah	8
3. Tujuan penelitian	8
4. Kegunaan penelitian	8
5. Kerangka Pemikiran.....	9
6. Metode Penelitian.....	12
8. Sistematika Penulisan	18
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	19
1. Perkawinan	19
1.1. Pengertian	19
1.2. Syarat Perkawinan	22
1.3. Tata Cara Perkawinan.....	29
1.4. Tujuan Perkawinan	31

2. Perkawinan Campuran	32
2.1. pengertian	32
2.2. Tata Cara Perkawinan	37
2.3. Akibat Perkawinan Campuran	38
3. Perkawinan Adat Tionghoa	43
3.1. Tahap Perkawinan Adat Tionghoa	43
3.2. Adat Istiadat Perkawinan Tionghoa	47
 BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
1. Letak Geografis Daerah Penelitian	50
2. Pelaksanaan Perkawinan antara wanita warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa dengan pria Taiwan melalui perantara	58
3. kedudukan dan akibat hukum dari perkawinan antara wanita warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa dengan pria Taiwan melalui perantara	67
 BAB V : PENUTUP	84
1. Kesimpulan	84
2. Saran	85
 DAFTAR PUSTAKA	87
 LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1	Jarak Kota Jambi ke Beberapa Kota Kabupaten..... 52
Tabel 2	Jumlah Penduduk per Kecamatan di Kota Jambi..... 53
Tabel 3	Etnis atau Suku di Kota Jambi..... 55
Tabel 4	Tempat Ibadah di Kota Jambi..... 56
Tabel 5	Jenis Pekerjaan Masyarakat Kota Jambi..... 57
Tabel 6	Pasangan Yang Melakukan Perkawinan Melalui Pesanan..... 66

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Ada 5 (lima) hal terpenting dan mendasar dalam kehidupan manusia, yaitu : kelahiran, pekerjaan, rezeki, perkawinan dan kematian. Perkawinan merupakan salah satu cita – cita setiap manusia dalam hidupnya dan hal ini didukung oleh setiap agama yang ada di Indonesia mewajibkan setiap pemeluknya untuk kawin.

Ketika benih – benih cinta itu tumbuh maka akan membawa seseorang masuk ke dalam tahap – tahap berpacaran, bertunangan, dan pernikahan atau perkawinan. Bagi setiap manusia memiliki keluarga yang bahagia dan abadi pasti menjadi tujuan setiap manusia dalam melangsungkan pernikahan. Untuk membuat pernikahan itu sukses diperlukan peran 2 (dua) orang, tetapi untuk menghancurkannya peran 1 (satu) orang sudah cukup.

Manusia dalam hidup bermasyarakat akan senantiasa dihadapkan pada suatu permasalahan hidup yang dihadapi oleh manusia yang satu dengan pribadi manusia yang lainnya tidaklah selalu sama, karena adanya perbedaan kepentingan maupun perbedaan situasi dan kondisi dari masing – masing individu di dalam masyarakat.

Manusia sejak dilahirkan selalu hidup bersama – sama dalam kelompok yang disebut masyarakat. Masyarakat merupakan suatu kehidupan bersama yang terorganisir untuk mencapai dan merealisasikan tujuan bersama.¹

¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm 2

Untuk menjaga agar jangan sampai terjadi pertentangan atau konflik antar individu di dalam masyarakat perlu adanya peraturan, baik peraturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis untuk menjaga ketertiban dalam kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan adanya peraturan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang mewajibkan setiap orang untuk mematuhi aturan – aturan yang ada, maka setiap orang tidak dapat bertindak menurut kehendaknya sendiri.

Peraturan yang tidak tertulis yang sering disebut dengan istilah hukum adat maupun peraturan yang tertulis yang dipakai untuk mengatur hubungan antar manusia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diwilayah Negara Indonesia ini sudah ada.

Demikian juga peraturan mengenai hubungan antar manusia yang satu dengan yang lainnya dalam kehidupan berkeluarga telah ada aturannya yaitu dengan dikeluarkannya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta pelaksanaanya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Ikatan seorang pria dengan seorang wanita dapat dipandang sebagai suami isteri, apabila ikatan mereka didasarkan pada suatu perkawinan yang sah, suatu perkawinan sah bilamana telah memenuhi syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang – Undang, baik syarat intern maupun syarat ekstern.

Di dalam suatu perkawinan suami berkedudukan sebagai bapak dalam rumah tangga dan isteri berkedudukan sebagai ibu rumah tangga dan dengan adanya perkawinan yang sah maka anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah akan berkedudukan sebagai anak yang sah pula,

dalam arti bahwa anak – anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan yang sah akan mempunyai hubungan hukum dengan kedua orang tuanya.

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan suatu bentuk hukum Perkawinan Nasional untuk pelaksanaan perkawinan di Indonesia , walaupun di dalamnya terdapat perbedaan aturan agama – agama.

Untuk hal itu pelaksanaan perkawinan menurut agama – agama itu berbeda – beda yaitu menurut agama Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha dan Konghucu. Dapat dikatakan pula bahwa setiap kesatuan rumah tangga keluarga Indonesia dibentuk atas dasar Undang – Undang yang sama berlaku bagi semua orang.

Pengertian perkawinan menurut Pasal 26 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata adalah merupakan hubungan – hubungan keperdataan saja, jadi dengan kata lain bahwa perkawinan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata hanya urusan lahiriah saja dan tidak termasuk unsur – unsur agama.

Rumusan Pasal 26 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa Undang – Undang memandang perkawinan hanya hubungan perdata, maksudnya ialah bahwa Undang – Undang tidak turut campur dalam upacara – upacara keagamaan yang diadakan. Undang – Undang hanya mengenal apa yang disebut “ Perkawinan Perdata “ yaitu perkawinan yang dilangsungkan dihadapan seorang pegawai catatan sipil.

Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria

dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa.

Apabila pengertian perkawinan menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dibandingkan dengan pengertian perkawinan yang terdapat dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, maka ada perbedaan yang prinsipil. Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah persatuan seorang pria dan wanita secara hukum untuk hidup bersama – sama. Hidup ini dimaksudkan untuk berlangsung selama – lamanya.²

Sejak berlakunya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka peraturan yang membagi tentang penggolongan penduduk di Indonesia dinyatakan tidak berlaku, sepanjang materi sudah diatur dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Ada fenomena yang terjadi pada masyarakat Kota Jambi yaitu mengenai Perkawinan antara Wanita Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa dengan pria Warga Negara Taiwan yang telah terjadi cukup lama, dimana perkawinan tersebut dapat terjadi melalui jasa perantara (makcomblang) yang berperan sebagai pihak perantara (makcomblang) yang mempertemukan pasangan.

² Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm 95

Adapun fakta yang terjadi dilapangan bahwa perkawinan tersebut pada umumnya dilakukan dengan akta di bawah tangan dengan perantara (makcomblang) dan dilaksanakan secara adat Tionghoa. Wanita muda keturunan Tionghoa disebut dengan istilah amoi, yang memiliki wajah dan penampilan yang menarik sehingga kecantikannya terkenal hingga ke Negara Asia khususnya Taiwan.

Menghadapi dilema tersebut, bahwa tidak selalu perbuatan yang diatur itu berarti dilarang atau dibolehkan, tetapi harus dilihat secara kasuistik.³

Pembentuk Undang – Undang tidak mungkin mengatur seluruh kegiatan kehidupan manusia secara lengkap dan tuntas. Kemampuan pembentuk Undang – Undang itu terbatas, ada kalanya pembentuk Undang – Undang tidak sempat mengatur suatu perbuatan dalam Undang – Undang tetapi mengatur lebih lanjut dalam Peraturan – Peraturan lain.

Ada kalanya pembentuk Undang – Undang sengaja tidak mengatur suatu perbuatan dalam Undang – Undang karena menyerahkan kepada Hakim untuk mengisinya. Ada kalanya tidak terpikirkan oleh pembentuk Undang – Undang untuk mengatur suatu perbuatan dalam Undang – Undang karena pada saat itu belum dirasakan mendesak untuk diatur atau tidak diduga akan terjadi kemudian. Dalam hal ini pun Hakim berkewajiban untuk mengisinya.⁴

Kalau perbuatan sekalipun tidak diatur dalam Undang – Undang tetapi bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan berarti dilarang, sedangkan perbuatan yang tidak diatur dalam Undang – Undang tetapi hanya

³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm 64

⁴ Loc - Cit

dibutuhkan demi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, berarti dibolehkan, kekosongan hukum harus diisi, harus dilengkapi ini adalah kewajiban seorang Hakim.⁵

Menarik untuk diketahui bahwa pertemuan diantara kedua calon suami isteri pada umumnya melalui suatu jasa perantara atau penyalur dimana masyarakat lebih mengenalnya dengan nama makcomblang. Dimana peranan dari perantara ini sangat penting sekali dalam pelaksanaan perkawinan diantara kedua calon suami isteri. Apabila seorang pria Taiwan hendak mencari seorang wanita Tionghoa Kota Jambi maka pria Taiwan cukup mendatangi perantara (makcomblang) yang ada di negaranya, kemudian perantara (makcomblang) tersebut akan bekerja sama dengan perantara (makcomblang) yang ada di Kota Jambi yang kemudian akan mempertemukan pasangan tersebut.

Perantara (makcomblang) yang telah dibayar oleh pria Taiwan akan mengurus semua kegiatan mulai dari pelaksanaan perkawinan kemudian memberikan sejumlah uang tertentu kepada keluarga si wanita dan wanita itu sendiri, serta mengurus izin keberangkatan pergi ke Taiwan dan sampai di Taiwan perantara (makcomblang) disana akan mengurus pendaftaran perkawinan kedua belah pihak.

Dikarenakan biaya perkawinan yang sangat mahal di Negara Taiwan hampir 3 (tiga) kali lipat dari Indonesia, serta sulitnya mencari wanita Taiwan yang sesuai, dan adanya peraturan di Negara Taiwan yang berlaku bagi seorang tentara untuk tidak kawin selama masih aktif, hal inilah yang menjadi

⁵ Loc – Cit

alasan atau yang melatar belakangi mengapa Pria – Pria Tawian cenderung untuk mencari pasangan hidupnya sampai ke Kota Jambi.

Faktor ekonomilah yang mendorong sehingga wanita – wanita keturunan Tionghoa di Kota Jambi bersedia untuk menjadi isteri dari pria Taiwan, sehingga dengan demikian diharapkan adanya perubahan nasib dari kehidupan keluarga si wanita. Karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa, begitu juga dengan perkawinan antara wanita Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa dengan pria Taiwan yang bertujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kalau dapat kekal untuk selamanya.

Perkawinan yang telah dilaksanakan secara adat Tionghoa ternyata ada sebagian pihak yang didaftarkan di kantor catatan sipil untuk mendapatkan pengesahan pernikahan dan ada yang tidak didaftarkan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik menyusun tesis dengan judul :“ **PELAKSANAAN PERKAWINAN ANTARA WANITA WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN TIONGHOA DENGAN PRIA TAIWAN MELALUI PERANTARA DAN AKIBAT HUKUMNYA DI KOTA JAMBI** “.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapatlah dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perkawinan antara wanita Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa dengan pria Taiwan melalui perantara ?

2. Bagaimanakah kedudukan dan akibat hukum dari perkawinan antara wanita Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa dengan pria Taiwan melalui perantara ?

3. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan antara wanita Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa dengan pria Taiwan melalui perantara.
2. Untuk mengetahui kedudukan dan akibat hukum dari perkawinan antara wanita Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa dengan pria Taiwan melalui perantara.

4. Kegunaan penelitian

1. secara teoritis, dapat memberikan sumbangsih pemikiran baik berupa pebendaharaan konsep, metode proposisi, ataupun pengembangan teori – teori dalam khasanah studi hukum dan masyarakat.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi tentang perkawinan antara wanita Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa dengan pria Taiwan melalui perantara.

6. Kerangka Pemikiran

Di dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa “ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa“.⁶

Ada beberapa perbedaan pengertian mengenai istilah Perkawinan campuran diantaranya yang dinyatakan dalam PerUndang – Undangan dan yang sering dinyatakan oleh anggota masyarakat sehari – hari. Khususnya di dalam perUndang – Undangan, Seperti kita ketahui, bahwa sebelum Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berlaku secara efektif di Indonesia terdapat beraneka ragam hukum perkawinan, antara lain : tentang perkawinan campuran atau Regeling Op de Gemengde Huwelijken Stb. 1898 Nomor 158 selanjutnya disebut GHR.

Mengenai Perkawinan campuran, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengaturnya di dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 62. Berdasarkan Pasal 66 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan GHR dinyatakan tidak berlaku.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan dari bunyi Pasal 57 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan campuran adalah perkawinan campuran Internasional (perkawinan yang dilakukan oleh warganegara Indonesia dengan warganegara asing).

Untuk mengungkap problematika yang telah diajukan pada bagian perumusan masalah, diajukan beberapa konsep yang terkait dengan judul tesis ini. Konsepsi operasional tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat dengan didasarkan pada dua konsep yang berbeda, yaitu konsep tentang ramalan – ramalan mengenai akibat (*Prediction of consequences*) yang dikemukakan oleh

⁶ K.wantjik saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, hlm 14

Lunberg dan Leansing tahun 1973 dan konsep Hans Kelsen tentang aspek – aspek rangkap dari suatu peraturan hukum. Berdasarkan konsep Lunberg dan Leansing, serta konsep Hans kelsen tersebut Robert B. Seidman dan William J. Chambliss menyusun suatu teori bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan suatu peraturan perundang – undangan sangat tergantung banyak faktor. Secara garis besar bekerjanya hukum dalam masyarakat akan ditentukan oleh beberapa faktor utama, faktor – faktor tersebut dapat :

- 1) Bersifat yuridis normatif (menyangkut pembuatan peraturan perundang – undangannya);
- 2) Penegakannya (para pihak dan peranan pemerintah);
- 3) Serta faktor yang bersifat yuridis sosiologis (menyangkut pertimbangan ekonomis serta kultur hukum pelaku bisnis);
- 4) Konsistensi dan harmonisasi antara politik hukum dalam konstitusi dengan produk hukum di bawahnya.⁷

Faktor bersifat yuridis normatif (menyangkut peraturan perundang – undangannya) dalam hal ini Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, faktor penegakannya (para pihak dan peranan pemerintah) dalam hal ini pegawai catatan sipil, serta faktor bersifat yuridis sosiologis (menyangkut pertimbangan ekonomis serta kultur hukum pelaku bisnis) adalah perantara (makcomblang) sebagai perantara dalam mempertemukan wanita

⁷ Suteki, *Hak Atas Air (di Tengah Liberalisasi Hukum dan Ekonomi dalam Kesejahteraan)*, Pustaka Magister Kenotariatan, Semarang, 2007, hlm 59 -60

Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa dengan pria Taiwan, yang meraup keuntungan dari perjodohan itu.

Faktor – faktor tersebut di atas saling berkaitan, hukum tidak dapat terlepas dari faktor penegakannya dan kultur (masyarakat) agar suatu peraturan dapat dilaksanakan dengan baik dan bertujuan dari dibuatnya peraturan tersebut dapat tercapai.

Berdasarkan penelitian diketahui bahwa, pertama perkawinan antara wanita Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa dengan pria Taiwan banyak dilakukan dibawah tangan, sehingga secara yuridis perkawinan tersebut tidak sah, karena tidak memenuhi syarat formal yaitu tidak dilakukan pencatatan perkawinan di kantor catatan sipil. Kedua saat ini belum ada jaminan perlindungan hukum terhadap para wanita Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa apabila mereka menjadi korban penipuan oleh perantara (makcomblang) dan pria Taiwan yang hanya memanfaatkan keuntungan wanita Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa yang berada pada posisi yang sangat lemah karena di bawah kekuasaan para perantara (makcomblang) dan pria Taiwan.

7. Metode Penelitian

Yang dimaksud dengan metode, adalah proses, prinsip – prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati – hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan

sebagai proses prinsip – prinsip dan tata cara untuk mencegah masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.⁸

Sesuai dengan tujuan penelitian hukum ini, maka dalam penelitian hukum kita mengenal adanya penelitian secara yuridis empiris. Penelitian normatif dilakukan dengan meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut penelitian kepustakaan. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan wawancara kepada responden sebagai nara sumber.

Menurut Sutrisno Hadi, metode penelitian merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana caranya atau langkah – langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :⁹

1. Metode pendekatan

Penelitian yuridis empiris dilakukan dengan cara meneliti di lapangan dengan cara wawancara dengan responden yang merupakan data primer dan meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut penelitian kepustakaan.¹⁰

Penelitian mengenai pelaksanaan perkawinan antara wanita Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa dengan pria Taiwan melalui perantara dan akibat hukumnya di kota Jambi adalah merupakan penelitian empiris, karena penelitian ini menitik beratkan pada penelitian di lapangan yang

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), hlm 6

⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset Nasional*. Jakarta. Rineka Cipta, 2001, hlm 46

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 9

menjelaskan situasi serta Hukum yang terjadi dan berlaku dalam masyarakat secara menyeluruh, sistematis, faktual, akurat mengenai fakta – fakta yang semuanya berhubungan dengan judul tesis “pelaksanaan perkawinan antara wanita Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa dengan pria Taiwan melalui perantara dan akibat hukumnya di kota Jambi.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.¹¹ Dikatakan deskriptif, maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai pelaksanaan perkawinan antara wanita Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa dengan pria Taiwan melalui perantara dan akibat hukumnya di kota Jambi.

3. Populasi

Populasi, adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek / subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹² Populasi dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan perkawinan antara wanita Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa

¹¹ Altherton & klemmack dan Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1999, hlm 63

¹² Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, 2001, hlm 57

dengan pria Taiwan melalui perantara yaitu : perantara / makcomblang, orang tua wanita dan wanita yang melakukan perkawinan tersebut.

Untuk menentukan sampel ini, metode penentuan sampel yang digunakan adalah Purposive sampling atau sampel bertujuan. Adapun mengenai sampel yang akan diambil menurut Ronny Hanitijo Soemitro mengemukakan pendapat bahwa secara prinsipnya tidak ada peraturan yang ketat secara mutlak berapa persen sampel tersebut harus diambil populasi.¹³

4. Teknik Penentuan Sampel

Dalam penelitian ini, teknik penarikan sampel yang dipergunakan oleh penulis adalah teknik Purposive (non random sampling) maksud dari digunakannya teknik ini agar diperoleh subyek – subyek yang ditunjuk sesuai dengan tujuan penelitian.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka subyek yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah para pihak yang terkait dengan pelaksanaan perkawinan antara wanita Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa dengan pria Taiwan melalui perantara yaitu : perantara / makcomblang, orang tua wanita dan wanita yang melakukan perkawinan tersebut.

¹³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op Cit*, hlm 47

5. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dapat digolongkan menjadi dua antara lain :

- a. Data primer, data yang diperoleh dari penelitian lapangan yaitu data secara langsung diperoleh dari responden dan nara sumber sebagai subyek penelitian. Wawancara dilakukan dengan responden dan nara sumber yang terlibat langsung dengan pelaksanaan perkawinan antara wanita Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa dengan pria Taiwan melalui perantara yaitu : perantara / makcomblang, orang tua wanita dan wanita yang melakukan perkawinan tersebut.
- b. Data sekunder, yaitu penelitian kepustakaan yang memiliki tujuan mencari, mempelajari dan mengumpulkan data sekunder yang berhubungan dengan obyek penelitian dengan melakukan studi dokumen terhadap buku – buku, literatur, perundang – undangan, dan dokumen yang terdiri dari :
 - Bahan Hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikatkan khususnya mengenai kawin kontrak, terdiri dari :
 1. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) ;
 2. Staatsblad 1917 Nomor 129 ;
 3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan;
 4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
 5. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Pengadilan Agama;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974.

- Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan – bahan yang memberi penjelasan lebih lanjut mengenai hal – hal yang telah dikaji bahan – bahan hukum primer yaitu :
 1. Berbagai bahan hukum kepustakaan membahas kawin campuran ;
 2. Buku – buku yang membahas tentang adat masyarakat Tionghoa ;
 3. Makalah – makalah yang berhubungan dengan perkawinan.
- Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari :
 1. kamus Hukum ;
 2. kamus Inggris Indonesia ;
 3. Berbagai majalah dan surat kabar.

6. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif.

Analisis data kualitatif, adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁴

Pengertian analisis di sini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan menginterpretasikan secara logis, sistematis. Logis sistematis menunjukkan

¹⁴ Soerjono soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm 14

cara berfikir deduktif – induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan – laporan penelitian ilmiah.

Setelah analisis penelitian selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.¹⁵

Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

7. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini, diperlukan adanya suatu sistematika penulisan, sehingga dapat diketahui secara jelas kerangka dari tesis ini.

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini berisi tentang latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini berisi tentang Perkawinan, Perkawinan Campuran, dan Perkawinan adat Tionghoa.

Bab III Hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasannya.

¹⁵ H.B Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif Bagian II*, UNS Press, Surakarta, 1988, hlm 37

Bab IV Penutup, bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan tesis yang berisi kesimpulan dan saran – saran.

Daftar Pustaka

Lampiran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Perkawinan

1. 1. Pengertian

Di dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa “ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa“.¹⁶

Pengertian perkawinan menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bukan hanya sekedar sebagai suatu perbuatan hukum

¹⁶ K.wantjik saleh, *Loc - Cit*

saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, sehingga oleh karenanya sah atau tidaknya suatu perkawinan digantungkan sepenuhnya pada hukum masing – masing agama dan kepercayaan yang dianut oleh rakyat Indonesia.¹⁷

Menurut Pasal 26 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dikatakan “ Undang – Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan Perdata “ dan dalam Pasal 81 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dikatakan bahwa tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan, sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka, bahwa perkawinan di hadapan pegawai pencatatan sipil telah berlangsung Pasal 81 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata ini diperkuat pula oleh Pasal 530 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang menyatakan “ seorang petugas agama yang melakukan upacara perkawinan yang hanya dapat dilangsungkan di hadapan pejabat catatan sipil, sebelum dinyatakan kepadanya bahwa pelaksanaan di hadapan pejabat itu sudah dilakukan, diancam dengan pidana denda paling banyak Rp. 4.500,- (empatribu lima ratus rupiah) “. Kalimat “ yang hanya dapat dilangsungkan di hadapan pejabat catatan sipil “ tersebut menunjukkan bahwa peraturan ini tidak berlaku bagi mereka yang berlaku hukum Islam, hukum Buddha-Hindu, dan Hukum Adat, yaitu orang – orang yang dahulu disebut pribumi (*Inlander*) dan Timur Asing (*Vreemde Oosterlingen*) tertentu di luar orang Cina.¹⁸

¹⁷ Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Hukum Perkawinan*, Alumni, Bandung, 1978, hlm 9

¹⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum adat, Hukum agama*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm 7

Selain kesimpang siuran perkawinan yang berlaku di zaman Hindia Belanda itu, jelas bahwa menurut perUndang - Undangan yang tegas dinyatakan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata , perkawinan itu hanya dilihat dari segi keperdataan dan mengabaikan segi keagamaan. Hal mana jelas bertentangan dengan falsafah Negara Pancasila yang menempatkan ajaran keTuhanan Yang Maha Esa di atas segala – galanya. Apalagi menyangkut masalah perkawinan yang merupakan perbuatan suci (sakramen) yang mempunyai hubungan erat sekali dengan agama / kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir / jasmani, tetapi juga unsur rohani/batin mempunyai peranan yang penting.

Dengan demikian jelas nampak perbedaan pengertian tentang perkawinan menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata hanya sebagai “ hubungan keperdataan “ sedangkan perkawinan menurut undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak hanya sebagai ikatan perdata tetapi juga merupakan “ perikatan keagamaan “. ¹⁹ Hal mana dilihat dari tujuan perkawinan yang dikemukakan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa. Kalimat demikian itu tidak ada sama sekali dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

¹⁹ Loc - Cit

Pengertian perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan perlu dipahami benar – benar oleh masyarakat. Oleh karena ia merupakan landasan pokok dari aturan Hukum Perkawinan lebih lanjut, baik yang terdapat dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam peraturan lainnya yang mengatur tentang perkawinan.

1.2. syarat – syarat Perkawinan

Seseorang yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat – syarat yang ditentukan Undang – Undang. Berhubung syarat – syarat perkawinan telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksana Nomor 9 Tahun 1975, maka syarat – syarat perkawinan yang diatur dalam ketentuan perUndang – Undangan lama dinyatakan tidak berlaku.²⁰

Di dalam mengemukakan syarat – syarat Perkawinan menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, syarat – syarat tersebut akan dikelompokkan,

²⁰ Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Badan Penerbit Unuversitas Diponegoro, Semarang, 2008, hlm 11

seperti apa yang dilakukan Ko Tjay Sing. Menurut Ko Tjay Sing, syarat – syarat untuk melangsungkan perkawinan ada 2 (dua), yaitu :²¹

a. Syarat – syarat Materiil

Yaitu syarat mengenai orang – orang yang hendak kawin dan izin – izin yang harus diberikan oleh pihak ketiga dalam hal – hal yang ditentukan oleh Undang – Undang. Selanjutnya syarat – syarat materiil dibagi 2 (dua) yaitu :

- 1) Syarat – syarat mutlak
- 2) Syarat – syarat relatif

Ad 1) Syarat materiil mutlak

yaitu, syarat yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang hendak kawin, dengan tidak memandang dengan siapa ia hendak kawin. syarat – syarat tersebut adalah :

- a) adanya penyesuaian kehendak yang bebas dari kedua calon suami isteri (Pasal 6 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).
- b) pemberian persetujuan yang harus diperoleh bagi pihak yang ingin melangsungkan perkawinan, yang berusia kurang dari 21 (duapuluh satu) tahun harus memperoleh persetujuan dari kedua orang tuanya. Dalam hal orang tua tidak ada atau sudah meninggal, persetujuan diperoleh dari wali, pengasuh atau seorang anggota keluarga dalam

²¹ Ibid, hlm 9 – 25

garis lurus ke atas (Pasal 6 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

- c) Pria tersebut telah mencapai usia 19 (sembilanbelas) tahun dan wanita sudah berusia 16 (enambelas) tahun. Namun pengadilan dapat memberikan izin, bahwa dalam kasus tertentu, pasangan calon suami isteri dapat melangsungkan perkawinan sebelum mencapai minimum umur yang disebut di atas (Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).
- d) Bagi wanita yang putus perkawinannya, berlaku waktu tunggu (Pasal 11 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), yaitu :
 - (1) Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tigapuluh) hari;
 - (2) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih datang bulan, ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang – kurangnya 90 (sembilanpuluh) hari, bagi yang tidak datang bulan ditetapkan 90 (sembilanpuluh) hari;
 - (3) Apabila perkawinan putus, sedangkan janda dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai ia dilahirkan;

- (4) Apabila perkawinan putus karena perceraian, sedangkan antara janda dan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin, maka tidak ada waktu tunggu.

Ad 2) Syarat materiil relatif

yaitu, syarat – syarat bagi pihak yang hendak kawin. Seorang yang telah memenuhi syarat – syarat materiil mutlak diperbolehkan kawin, tetapi ia tidak boleh kawin dengan setiap orang. Dengan siapa hendak kawin, harus memenuhi syarat – syarat materiil relatif.

Syarat – syarat tersebut adalah :

a. Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- (1) Berhubungan darah dalam garis keturunan ke bawah atau ke atas ;
- (2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang saudara dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya ;
- (3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu – bapak tiri ;
- (4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan dan bibi susuan ;
- (5) Berhubungan saudara dengan isteri, atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang ;

(6) Yang mempunyai hubungan oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku sekarang (Pasal 8 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

b. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Pasal 9 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

c. Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang bahwa masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

b. Syarat – syarat formil

Syarat – syarat formil terdiri dari formalitas – formalitas yang mendahului perkawinannya. Syarat – syarat formil diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pelaksana Nomor 9 Tahun 1975, yaitu terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu :

1. Pemberitahuan kepada pegawai pencatat perkawinan ;
2. Penelitian syarat – syarat perkawinan ;
3. Pengumuman tentang pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan.

Ad 1) Pemberitahuan kepada pegawai pencatat perkawinan

Calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat perkawinan di tempat perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan itu harus dilakukan selambat – lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Pengecualian terhadap jangka waktu itu dapat diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah, apabila ada alasan penting. Kehendak untuk melangsungkan perkawinan, pada prinsipnya harus dilakukan secara lisan oleh salah satu atau kedua calon mempelai, atau orang tua atau wakilnya. Tetapi apabila karena sesuatu alasan yang sah pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan secara lisan itu tidak mungkin dilakukan, maka pemberitahuan dapat dilakukan secara tertulis (penjelasan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Kemudian dalam memberitahukan maksud untuk melangsungkan perkawinan itu, harus memuat pula : nama, umur, agama atau kepercayaan, pekerjaan, tempat tinggal orang tua calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu. Menurut penjelasan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal –

hal yang harus dimuat dalam pemberitahuan tersebut merupakan ketentuan minimal, sehingga masih dimungkinkan ditambah hal – hal lain, misalnya wali nikah, bagi mereka yang beragama Islam.

Ad 2) Penelitian syarat – syarat perkawinan

Setelah pegawai pencatat perkawinan menerima pemberitahuan kawin, maka ia harus meneliti apakah syarat – syarat perkawinan sudah terpenuhi atau belum dan apakah ada halangan perkawinan menurut Undang – Undang. Pegawai pencatat perkawinan juga meneliti :

a) Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai.

Apabila tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat;

b) Keterangan mengenai nama, agama atau kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;

c) Izin tertulis atau izin dari pengadilan, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun;

d) Izin dari pengadilan, dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri;

- e) Surat kematian isteri atau suami yang terdahulu. Dalam hal terjadi perceraian disertakan pula surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih;
- f) Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pertahanan Keamanan / PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata;
- g) Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh pegawai pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

Ad 3) Pengumuman tentang pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan

Setelah semua syarat – syarat perkawinan dipenuhi, maka pegawai pencatat lalu mengadakan pengumuman tentang pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan, dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor pencatatan perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

Pengumuman ditandatangani oleh pegawai pencatat perkawinan dan memuat hal ihwal orang yang akan melangsungkan perkawinan, juga memuat kapan dan dimana perkawinan itu akan dilangsungkan.

1.3. Tata Cara Perkawinan

Pasal 12 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa, tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perUndang – Undangan tersendiri. Ketentuan mengenai tata cara perkawinan diatur dalam Bab III, Pasal 8 dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan sebagai berikut :²²

- a. Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat ;
- b. Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu ;
- c. Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing – masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat perkawinan dan dihadiri oleh dua orang saksi;
- d. Sesaat setelah perkawinan dilangsungkan, akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat perkawinan, lalu ditandatangani oleh :
 1. Kedua mempelai ;
 2. Kedua orang saksi yang menghadiri berlangsungnya perkawinan itu ;
 3. Pegawai pencatat perkawinan ;

²² Ibid, hlm 33 – 34

4. Khusus bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, akta perkawinan harus ditandatangani oleh wali nikah atau yang mewakili ;
5. penandatanganan akta perkawinan oleh wali nikah atau yang mewakili, tidak berlaku bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya tidak berdasarkan agama Islam ;
6. dengan ditandatanganinya akta perkawinan oleh pihak – pihak yang ditentukan dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan secara resmi telah dicatat.

1.4. Tujuan perkawinan

Di dalam Pasal 1 Undang – Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami isteri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa “ untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing – masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material ”.²³

Bagaimana bentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu? jelas yang dimaksud berdasarkan ajaran yang dianut masyarakat Indonesia seperti ajaran Islam, Kristen, katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu.

²³ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, Cetakan kedua, 1994, hlm 6

Sebagaimana dijelaskan dari Pasal 1 tersebut bahwa “ Perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan Agama / kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir / jasmani, tetapi unsur batin / rohani juga mempunyai peranan yang penting”.

Pembentukan keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan, dimana pemeliharaan dan pendidikan anak – anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Dengan demikian yang menjadi tujuan perkawinan menurut perUndang – Undangan adalah untuk kebahagiaan suami – isteri, untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan keagamaan, dalam kesatuan keluarga yang bersifat Parental (ke orang tua an). Hal mana berarti lebih sempit dari tujuan perkawinan menurut Hukum Adat yang masyarakatnya menganut sistem kekerabatan yang bersifat Patrilineal (kebapakan) seperti Batak, Lampung, Bali dan sebagainya, dan sistem kekerabatan yang bersifat Matrilineal (keibuan) seperti orang Minang dan beberapa suku lain, yang masih kuat ikatan kekerabatannya, serta dalam sistem ketetanggaan yang bersifat Bilateral (kekeluargaan pihak ayah dan ibu) di daerah – daerah.

2. Perkawinan Campuran

2.1. pengertian

Ada beberapa perbedaan pengertian mengenai istilah Perkawinan campuran diantaranya yang dinyatakan dalam PerUndang – Undangan dan yang sering dinyatakan oleh anggota masyarakat sehari – hari. Khususnya di dalam perUndang – Undangan, Seperti kita ketahui, bahwa sebelum Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berlaku secara efektif di

Indonesia terdapat beraneka ragam hukum perkawinan, antara lain : tentang perkawinan campuran atau Regeling Op de Gemengde Huwelijken Stb. 1898 Nomor 158 selanjutnya disebut GHR.

Mengenai Perkawinan campuran, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengaturnya di dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 62. Berdasarkan Pasal 66 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan GHR dinyatakan tidak berlaku.

Adapun pengertian Perkawinan campuran adalah sebagai berikut :

1. Pasal 1 GHR Stb. 1898 Nomor 158

Perkawinan campuran yaitu Perkawinan antara orang – orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan. Dengan demikian yang termasuk perkawinan campuran yaitu :

- a. Perkawinan Internasional ;
- b. Perkawinan antar golongan ;
- c. Perkawinan antar tempat (antar adat) ;
- d. Perkawinan antar agama.

2. Pasal 57 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Perkawinan campuran yaitu, perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu berkewarganegaraan Indonesia.²⁴

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan dari bunyi Pasal 57 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan

²⁴ Mulyadi, *Op Cit*, hlm 64 – 65

campuran adalah perkawinan campuran Internasional (perkawinan yang dilakukan oleh warganegara Indonesia dengan warganegara asing).

Dari 2 (dua) Pasal di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian Perkawinan campuran menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan lebih sempit daripada GHR, Karena Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membatasi pada “ karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia” , sedangkan menurut GHR “ antara orang – orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum – hukum yang berlainan “ dengan tidak ada pembatasan.

Yang dimaksud dengan hukum yang berlainan adalah karena perbedaan kewarganegaraan, tempat, golongan dan agama. Dengan adanya pembatasan pada perbedaan kewarganegaraan itu, maka perkawinan antara dua orang yang berlainan golongan (umpamanya : Bumi Putra dan Timur Asing) atau berlainan agama (umpamanya : Islam dan Kristen) tetapi sama – sama warganegara Indonesia, tidak merupakan perkawinan campuran menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan menurut GHR adalah Perkawinan campuran.

Jadi Perkawinan campuran menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebagai berikut :²⁵

1. Seorang pria Warga Negara Indonesia kawin dengan seorang wanita Warga Negara Asing atau;
2. Seorang wanita Warga Negara Indonesia kawin dengan seorang pria Warga Negara Asing.

²⁵ K. Wantjik Saleh, *Op Cit*, hlm 46

Sehubungan dengan masalah Kewarganegaraan tersebut, maka ditentukan dalam Pasal 58 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa orang yang melakukan Perkawinan campuran itu, dapat memperoleh Kewarganegaraan dari suami / isterinya dan dapat pula kehilangan Kewarganegaraannya, menurut cara – cara yang telah ditentukan dalam Undang – Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang telah berlaku.

Mengenai status Kewarganegaraan dalam perkawinan campuran menurut hukum positif Indonesia saat ini mengacu kepada Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Pada prinsipnya Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan menganut asas persamaan kedudukan yang mana wanita atau laki – laki yang kawin dengan orang asing dapat kehilangan Kewarganegaraan Indonesianya akibat perkawinan tersebut.

Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut :

1. Perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki – laki Warga Negara Asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum Negara asal suaminya, Kewarganegaraan isteri mengikuti Kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut ;
2. Laki - laki Warga Negara Indonesia yang kawin dengan Perempuan Warga Negara Asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum Negara asal isterinya, Kewarganegaraan suami mengikuti Kewarganegaraan isteri sebagai akibat perkawinan tersebut .

Dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan campuran tidak dengan sendirinya menentukan isteri takluk pada status Kewarganegaraan suami, artinya tidak dengan sendirinya isteri takluk pada hukum yang berlaku bagi suami. Jadi dari ketentuan tersebut, baik laki – laki maupun perempuan memiliki kedudukan yang sama yang mana akan dapat kehilangan Kewarganegaraan Indonesia akibat perkawinan campuran tersebut.

Hal ini sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang mana laki – laki atau wanita yang melakukan perkawinan campuran akan mengikuti status isteri atau suami apabila Negara dari isteri atau suami menghendaki demikian. Namun apabila tidak, Undang – Undang memperbolehkan masing – masing pihak mempertahankan Kewarganegaraannya.

Perkawinan antar bangsa yang terjadi di Indonesia, Undang – Undang memberikan kesempatan bagi suami dan isteri untuk memilih Kewarganegaraannya, yang berarti suami dapat memperoleh Kewarganegaraan isteri jika ia memilih mengikuti Kewarganegaraan isterinya, demikian juga isteri dapat memperoleh Kewarganegaraan suami jika isteri dengan kehendak sendiri menentukan mengikuti Kewarganegaraan suami.²⁶ Apabila dalam perkawinan campuran tersebut baik suami maupun isteri masing – masing tetap pada Kewarganegaraan semula atau antara suami dan isteri menganut Kewarganegaraan yang berbeda, maka akan timbul masalah pada saat terjadi perceraian.

²⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Sahir co, Medan, 1975, hlm 240

2.2. Tata Cara Perkawinan

Tata cara perkawinan campuran diatur di dalam Pasal 58 ayat (2) sampai dengan Pasal 61 ayat (1) Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan sebagai berikut :²⁷

- a. perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang – Undang perkawinan ini;
- b. perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat – syarat perkawinan yang telah ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing – masing telah dipenuhi;
- c. untuk membuktikan bahwa syarat – syarat yang terdapat dalam Pasal 60 ayat (1) tersebut telah dipenuhi dan karena itu tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing – masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat – syarat telah dipenuhi;
- d. jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak;

²⁷ Mulyadi, *Op Cit*, hlm 66 – 67

- e. jika pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan yang tersebut dalam Pasal 60 ayat (3) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- f. surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai ketetapan lagi, jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan;
- g. perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.

2.3. Akibat Perkawinan Campuran

a. Terhadap isteri

Akibat perkawinan campuran terhadap isteri, diatur dalam Pasal 58 dan Pasal 59 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan sebagai berikut :²⁸

- 1) bagi orang – orang yang berlainan Kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh Kewarganegaraan dari suami atau isteri dan dapat pula kehilangan Kewarganegaraannya, menurut cara – cara yang ditentukan dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan atau Undang – Undang Perkawinan (Pasal 58 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).
- 2) Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum Publik maupun mengenai hukum Perdata (Pasal 59 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

²⁸ Ibid, hlm 73

Meskipun status hukum isteri berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengikuti status hukum suaminya, namun dalam hal Kewarganegaraan isteri diatur oleh Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pengaturan Kewarganegaraan berdasarkan Undang – Undang Kewarganegaraan , adalah sebagai berikut :²⁹

- a) Pasal 26 ayat (1) menentukan bahwa : “...perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki – laki Warga Negara Asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia, jika menurut hukum Negara asal suaminya, Kewarganegaraan isteri mengikuti Kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut “ ;
- b) Pasal 26 ayat (3) menentukan bahwa : “...perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laki – laki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki – laki tersebut, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan berkewarganegaraan ganda “ ;
- c) Pasal 26 ayat (4) menentukan bahwa ; “...surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan oleh perempuan sebagaimana dimaksud ayat (1) atau laki – laki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal perkawinannya berlangsung “.

²⁹ Lihat : *Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006, tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.*

b. Terhadap anak

akibat perkawinan campuran terhadap anak diatur dalam Pasal 62 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa : “...Dalam Perkawinan campuran kedudukan anak diatur dengan Pasal 59 ayat (1) Undang – Undang ini “. Dengan demikian akibat perkawinan campuran terhadap anak yaitu anak memperoleh hukum Publik maupun hukum Perdata dari bapaknya.³⁰

Untuk mengetahui status anak yang lahir dalam perkawinan campuran dengan sendirinya pun harus berpedoman pada ketentuan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Berkaitan dengan ketentuan mengenai anak hasil perkawinan campuran dapat memperoleh Kewarganegaraan ganda terbatas, terdapat di dalam pasal – pasal berikut :³¹

- 1) Pasal 4 huruf (c) menyatakan bahwa : “...anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu Warga Negara Asing” ;
- 2) Pasal 4 huruf (d) menyatakan bahwa : “...anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Asing dan ibu Warga Negara Indonesia” ;
- 3) Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa : “...anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18

³⁰ Mulyadi, *Op Cit*, hlm 75

³¹ Lihat : *Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006, tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.*

(delapanbelas) tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia” ;

- 4) berdasarkan Pasal 6, anak tersebut sampai berusia 18 (delapanbelas) tahun mempunyai Kewarganegaraan ayah dan Kewarganegaraan ibunya. Setelah berusia 18 (delapanbelas) tahun anak tersebut harus memilih salah satu yaitu Kewarganegaraan ayah atau ibunya. Hal ini diatur dalam Pasal 6 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, yang menentukan bahwa :

- a) Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa : “...dalam hal status

Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf I, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapanbelas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu Kewarganegaraannya” ;

- b) Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa : “...pernyataan untuk

memilih Kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana ditentukan di dalam Peraturan perUndang – Undangan ;

- c) Pasal 6 ayat (3) menyatakan bahwa : “...pernyataan untuk

memilih Kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 (delapanbelas) tahun atau sudah kawin”.

5) selain aturan – aturan tersebut di atas, secara terperinci dan jelas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, telah menetapkan anak – anak yang berhak menjadi subyek Kewarganegaraan ganda terbatas adalah sebagai berikut :

a) anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu

Warga Negara Asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapanbelas) tahun atau belum kawin;

b) anak yang dilahirkan di luar wilayah Negara Indonesia dari

seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari Negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan Kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan ;

c) anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun

diangkat secara sah sebagai anak oleh Warga Negara Asing berdasarkan penetapan pengadilan.

3. Perkawinan Adat Tionghoa

Pada zaman dahulu, perkawinan diatur oleh orang tua dan dirancang oleh perantara (mak comblang), anak – anak tidak berhak bicara. Persiapan perkawinan mulai ketika sebuah keluarga mengirim seorang perantara (mak comblang) ke keluarga lain dengan membawa lamaran perkawinan. Delapan trigram kedua orang ini dibandingkan untuk melihat apakah mereka sesuai dan keputusan terakhir ada di tangan orang tua.

Perkawinan bagaikan tonggak penting dalam kehidupan seseorang. Perkawinan bagi bangsa Tionghoa memiliki banyak Adat istiadat dan perayaan yang rumit, dan banyak di antaranya yang masih dipraktikkan hingga sekarang.

3.1. Tahap perkawinan adat Tionghoa³²

1. Mengantar persembahan (barang) tunangan

Persembahan pertunangan adalah hadiah yang dikirimkan mempelai pria pada keluarga mempelai wanita untuk memastikan perjodohan. Hadiah pertunangan itu juga meliputi barang pribadi mempelai. Semua itu merupakan ungkapan terima kasih mempelai pria untuk orang tua mempelai wanita yang telah membesarkan putrinya.

2. Bertunangan

³² Li xiao xiang dan Fu chun jiang, *Orging of Chinese people and custom, asal mula budaya dan Bangsa Tionghoa*, PT. Elex Media Komputindo kelompok Gramedia, Jakarta, 2003, hlm 19

Calon mempelai bertukar cincin, dan kue – kue dibagikan kepada teman dan kerabat untuk memberitahukan kabar tersebut.

3. Bertukar Hadiah

Keluarga mempelai pria membawa hadiah bagi keluarga mempelai wanita. Biasanya jumlahnya enam buah, yang dipilih dari benda berikut : angpau merah, sepasang lilin merah, satu atau lebih perhiasan emas, kaki babi, arak, kue, manisan buah, permen, ayam, pakaian pengantin, buah segar, dan lain – lain.

Hadiah ini ditempatkan di nampan merah dan tertua dari keluarga mempelai pria akan membawanya kepada keluarga mempelai wanita. Biasanya keluarga mempelai wanita akan mengembalikan beberapa dari hadiah itu.

4. Menata rambut

Pada malam perkawinan, kedua mempelai menjalani upacara “ menata rambut “ di rumah masing – masing. Seorang wanita atau lelaki tua dengan pasangannya yang masih hidup dan banyak anak dan cucu akan menata rambut mempelai pria dan wanita. Ritual ini dilakukan dengan harapan pengantin baru akan hidup sampai tua dalam berkat perkawinan dan memiliki banyak anak dan cucu.

5. Mengatasi penghalang

Mempelai pria akan dihalangi oleh teman – teman mempelai wanita ketika memasuki rumah mempelai. Untuk melewati hambatan ini, mempelai pria memberi para wanita ini angpau merah besar. Kedua pihak akan tawar menawar tentang jumlahnya dipintu.

6. Menunduk pada langit dan bumi

Dimasa lalu, mempelai pria dan wanita harus menunduk pada langit dan bumi, orang tua mereka, dan antara mereka satu sama lainnya selama upacara perkawinan sebelum mereka dianggap menikah.

7. Upacara Teh

Kemudian pasangan itu pergi ke tempat mempelai pria. Pengantin baru kemudian menawarkan teh pada tertua dari keluarga mempelai pria. Dengan minum teh tertua ini menunjukkan penerimaan mereka terhadap mempelai sebagai anggota baru keluarga. Pengantin baru kembali ke rumah mempelai wanita untuk menawarkan teh pada tertua keluarga wanita. Mempelai pria juga memberikan babi panggang, sayuran, dan buah sebagai penghormatan bagi mertuanya. Biasanya sang mertua hanya menerima separuh dari pemberian tersebut, dan separuhnya lagi kembali dibawa pengantin baru.

8. Pesta Perkawinan

Keluarga mempelai pria biasanya mengadakan pesta setelah upacara perkawinan. Tamu – tamu dari kedua keluarga diundang. Tamu – tamu memberi angpau untuk menunjukan doa restu mereka.

9. Menggoda pengantin baru

Setelah pesta perkawinan, teman dekat dan kerabat ke kamar pengantin untuk menggoda pengantin, praktek ini juga merupakan

bentuk pemberian doa restu, dan mulai dilakukan sejak roh rubah dan hantu sering muncul di kamar pengantin, untuk mengusir roh ini, harus ada banyak orang di kamar pengantin.

10. Menyikap kerudung

Kepala mempelai wanita ditutupi kerudung merah. Setelah tiba di rumah mempelai pria dan melalui upacara perkawinan, mempelai pria kemudian menyingkap kerudung itu. Di beberapa tempat, mempelai pria menggunakan tongkat besi atau kipas untuk mengangkat kerudung.

11. Arak perkawinan

Pengantin baru, minum arak perkawinan di kamar pengantin, mereka minum setengah cangkir dari masing – masing cangkir mereka, kemudian bertukar cangkir dan minum lagi.

12. Mengikat sejumput rambut

Praktek ini dilakukan selama Dinasti Song dan Tang. Setelah mempelai minum arak, mereka memotong sejumput rambut mereka dan mengikatnya menjadi satu untuk menunjukkan bahwa mereka satu hati.

13. Kembali ke rumah masa gadis

Setelah tiga hari, tujuh bahkan sampai sembilan hari setelah perkawinan, mempelai wanita mengunjungi rumah orang tuanya.

14. Upacara perkawinan

Selama Dinasti Zhou, upacara perkawinan dilaksanakan pada waktu malam. Mempelai pria yang mengenakan pakaian hitam menjemput mempelai wanita ketika hari gelap. Pengiring pengantin bahkan keretanya juga berwarna hitam. Mereka yang berjalan di depan kereta akan membawa lilin untuk menerangi jalan.

3.2. Adat istiadat perkawinan Tionghoa³³

1. Tangisan perkawinan

Dibeberapa daerah, dua minggu sampai satu bulan upacara perkawinan, mempelai mulai menangis berirama. Lirik lagunya kebanyakan tentang kesedihan karena akan berpisah dari orang tua, kakak, dan kakak ipar. Kadang – kadang, saudaranya, kakak ipar, orang tua bahkan kerabat ikut bergabung dalam nyanyian itu.

2. Makan bakpau setengah matang

Dibeberapa daerah, mempelai wanita ditawari bakpau setengah matang. Jika mempelai wanita makan bakpau, ia akan bertanya : “ sheng bu sheng ?” pertanyaan ini merupakan permainan kata yang berarti “ apakah ini mentah ?” atau apakah kamu akan punya bayi ?” jika mempelai menjawab “ sheng” artinya ini mentah “ atau aku akan punya bayi “.

3. Menggendong mempelai

³³ Ibid, hlm 20

Kebiasaan ini dipraktikkan dimasa lalu di Taiwan. Pada hari perkawinan, mempelai pria menggendong mempelai wanita, dan dengan berkat kedua keluarga, berlari kembali kerumahnya. Setelah tiba di rumah mempelai pria, mengelilingi tempat perkawinan dua kali sebelum bertemu dengan keluarga dan temannya. Akhirnya ia berlari ke kamar pengantin.

4. Kebahagiaan ganda

Salah satu adat perkawinan yang populer adalah memperkenalkan huruf kebahagiaan ganda di pintu dan jendela. Bahkan ada sulaman huruf ini di bantal dan selimut.

5. Membagikan telur merah

Dibeberapa tempat, telur merah dibagikan saat ada perkawinan. Apakah anda kerabat atau bahkan orang asing, anda masih bisa meminta telur merah.

6. Tanggal Perkawinan Tabu

Hal yang baik selalu berpasangan, perkawinan merupakan hari kebahagiaan bagi kedua mempelai. Tidak baik memilih tanggal yang memiliki angka ganjil. Kebanyakan hari perkawinan jatuh pada tanggal dengan angka genap, bulan kelima, ketujuh dan kesembilan dianggap tidak baik. Karenanya, akan bodoh merencanakan perkawinan dalam bulan ini. Jika dalam kedua keluarga terjadi kematian, menyelenggarakan perkawinan juga dianggap tidak baik.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Letak Geografis Daerah Penelitian

Jambi adalah sebuah [provinsi Indonesia](#) yang terletak di pesisir timur di bagian tengah Pulau [Sumatra](#). Jambi juga merupakan nama sebuah kota di provinsi ini, yang merupakan kota ibukota provinsi. Jambi adalah satu dari tiga provinsi di Indonesia yang ibukota-nya bernama sama dengan nama provinsinya, selain [Bengkulu](#) dan [Gorontalo](#).

Provinsi Jambi, berada di bagian tengah Pulau Sumatera, sebagian besar menempati Daerah Aliran Sungai Batanghari. Secara geografis terletak antara 0°45' sampai 2°45' Lintang Selatan dan antara 101°10' sampai 104°55' Bujur Timur.

Luas Wilayah Provinsi Jambi 53.435 Km², kini terbagi menjadi 10 Daerah Tingkat II yang terdiri dari ³⁴.

1. Kabupaten Kerinci 4.200 Km² (7,86%)
2. Kabupaten Merangin 6.380 Km² (11,94%)
3. Kabupaten Sarolangun 7.820 Km² (14,63%)
4. Kabupaten Batanghari 4.983 Km² (9,33%)
5. Kabupaten Muaro Jambi 6.147 Km² (11,50%)
6. Kabupaten Tanjung Jabung Timur 5.330 Km² (9,97%)
7. Kabupaten Tanjung Jabung Barat 4.870 Km² (9,11%)
8. Kabupaten Tebo 6.340 Km² (11,86%)
9. Kabupaten Bungo 7.160 Km² (13,40%)
10. Kota Jambi 205, 38 Km² (0,38%)

³⁴ Sumber : *Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi 2007*

Batas wilayah Provinsi Jambi secara administratif adalah sebagai berikut :³⁵

- sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Riau dan Kepulauan Riau ;
- Sebelah Timur dengan Laut Cina Selatan dan selat berhala ;
- sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan ;
- sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Bengkulu.

Sedangkan Kota Jambi sebelah utara, barat, selatan dan timur berbatasan dengan Kabupaten Muaro Jambi, dengan kata lain Kota Jambi ini wilayahnya dikelilingi oleh Kabupaten Muaro Jambi.

Luas Kota Jambi 205,38 Km, yang terdiri dari 8 (delapan) Kecamatan, yaitu sebagai berikut :³⁶

1. Kecamatan Kotabaru dengan luas wilayah 77,78 Km².
2. Kecamatan Jambi Selatan dengan luas wilayah 34, 07 Km².
3. Kecamatan Jelutung dengan luas wilayah 7, 92 Km².
4. Kecamatan Pasar Jambi dengan luas wilayah 4, 02 Km.
5. Kecamatan Telanaipura dengan luas wilayah 30, 39 Km².
6. Kecamatan Danau Teluk dengan luas wilayah 15, 70 Km².
7. Kecamatan Pelayangan dengan luas wilayah 15, 29 Km².

³⁵ Sumber : *Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi 2007*

³⁶ Sumber : *Kota Jambi dalam angka tahun 2007*

8. Kecamatan Jambi Timur dengan luas wilayah 20,21 Km².

Tabel berikut ini akan menunjukkan jarak kota Jambi ke beberapa kota kabupaten di Provinsi Jambi sebagai berikut :

TABEL 1

JARAK KOTA JAMBI KE BEBERAPA KOTA KABUPATEN

NO	KOTA - KABUPATEN	JARAK (Km ²)
1	Kota Jambi ke Muara Bulian	60
2	Kota Jambi ke Muara Bungo	262
3	Kota Jambi ke Bangko	255
4	Kota Jambi ke Sungai Penuh	419
5	Kota Jambi ke Kuala Tungkal	131
6	Kota Jambi ke Sarolangun	179
7	Kota Jambi ke Muara Sabak	129
8	Kota Jambi ke Muara Tebo	206
9	Kota Jambi ke Sengeti	27

Sumber : *PU Provinsi Jambi 2007*

Jumlah penduduk per kecamatan di kota Jambi, dapat diuraikan dalam tabel berikut :

TABEL 2

JUMLAH PENDUDUK PER KECAMATAN DI KOTA JAMBI

NO	KECAMATAN	JUMLAH (JIWA)
1	Kotabaru	100.663
2	Jambi selatan	98.507
3	Jelutung	60.791
4	Pasar Jambi	13.964
5	Telanaipura	76.045
6	Danau Teluk	12.119
7	Pelayangan	12.312
8	Jambi Timur	78.159
	Jumlah	452.560

Sumber : *Badan Pusat Statistik Kota Jambi 2007*

Berdasarkan hasil laporan Badan Pusat Statistik Kota Jambi, bekerjasama dengan bagian Pemerintahan di Kecamatan, pada tahun 2007, jumlah penduduk Kota Jambi yaitu 452. 560 (empatatus limapuluh dua ribu limaratus enampuluh) jiwa, jumlah tersebut tersebar di 8 (delapan) Kecamatan, meliputi Kecamatan Kotabaru berjumlah 100. 663 (seratus ribu enamatus enampuluh tiga) jiwa, Kecamatan Jambi Selatan berjumlah 98. 507 (sembilanpuluh delapanribu limaratus tujuh) jiwa, Kecamatan Jelutung berjumlah 60. 791 (enampuluh ribu tujuhatus sembilanpuluh satu) jiwa, Kecamatan Pasar Jambi berjumlah 13. 964 (tigabelas ribu sembilanatus enampuluh empat) jiwa, Kecamatan Telanaipura berjumlah 76. 045 (tujuh puluh enamribu empatpuluh lima) jiwa, Kecamatan Danau Teluk berjumlah 12. 119 (duabelas ribu seratus sembilanbelas) jiwa,

Kecamatan Pelayangan berjumlah 12. 312 (duabelas ribu tigaratus duabelas) jiwa, dan Kecamatan Jambi Timur berjumlah 78. 159 (tujuh puluh delapan ribu seratus limapuluh Sembilan) jiwa.

Jumlah etnis atau suku di kota Jambi, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 3

ETNIS ATAU SUKU DI KOTA JAMBI

NO	ETNIS ATAU SUKU	JUMLAH (JIWA)	PERSENTASE (%)
1	Melayu	135.768	30
2	Minang	90.512	20
3	Jawa	90.512	20
4	Batak	54.307	12
5	Tionghoa	58.833	13
6	Lain – lain	22.628	5
	Jumlah	452.560	100

Sumber : *Badan Pusat Statistik kota Jambi 2007*

Data di atas menunjukkan jumlah etnis atau suku melayu di kota Jambi berjumlah 135.768 (seratus tigapuluh limaribu tujuh ratus enampuluh delapan) jiwa, etnis atau suku minang berjumlah 90.512 (sembilanpuluh ribu limaratusduabelas) jiwa, etnis atau suku jawa berjumlah 90.512 (sembilanpuluh ribu limaratusduabelas) jiwa, etnis atau suku batak berjumlah 54.307 (limapuluh empatribu tigaratus tujuh) jiwa, etnis atau suku Tionghoa berjumlah 58.833 (limapuluh delapanribu delapanratus tigapuluh tiga) jiwa dan etnis atau suku lainnya berjumlah 22.628 (duapuluh duaribu enamratus duapuluh delapan) jiwa.

Jumlah tempat ibadah di Kota Jambi, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 4

TEMPAT IBADAH DI KOTA JAMBI

NO	TEMPAT IBADAH	JUMLAH (buah)
1	Masjid	296
2	Langgar	273
3	Mushola	81
4	Gereja	27
5	Vihara	12
6	Pure	1
7	Klenteng	18

Sumber : *Depag kota Jambi 2007*

Data di atas menunjukkan jumlah Masjid sebanyak 296 (duaratus sembilanpuluh enam) buah, Langgar sebanyak 273 (duaratus tujuh puluh tiga) buah, Mushola sebanyak 81 (delapanpuluh satu) buah, Gereja sebanyak 27 (duapuluh tujuh) buah, Vihara sebanyak 12 (duabelas) buah, Pure sebanyak 1 (satu) buah, Klenteng sebanyak 18 (delapanbelas) buah.

Terhadap jenis pekerjaan pada masyarakat di kota Jambi, secara umum dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 5
JENIS PEKERJAAN MASYARAKAT
KOTA JAMBI

NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH
1	Perkebunan	2.874
2	Kehutanan	2.126
3	Perikanan	1.748
4	Petani	1.556
5	Industri	20.830
6	Konstruksi	17.576
7	Perdagangan Hotel dan Restoran	55.420
8	Transportasi dan komunikasi	13.973
9	Listrik, gas dan air	845
10	Jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan	41.556
11	Peternak	635
12	Keuangan	4.551
	Jumlah	163.690

Sumber : *Badan Pusat Statistik kota Jambi 2007*

2. Pelaksanaan perkawinan antara wanita Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa dengan pria Taiwan melalui perantara

Pengertian perkawinan dalam ketentuan Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam Pasal 1 yang merumuskan perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dapat diketahui terdapat 3 (tiga) unsur pokok yang terkandung di dalamnya :

1. Perkawinan sebagai suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita ;
2. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal ;
3. Perkawinan berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa.

Sebagai ikatan lahir batin, suatu perkawinan tidak cukup hanya dalam ikatan lahir saja atau ikatan berumah tangga. Ikatan lahir merupakan suatu ikatan yang dapat dilihat yang mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri, dengan kata lain dapat disebut “ hubungan formal” baik yang mengikat dirinya sendiri maupun bagi orang lain atau bermasyarakat.

Ikatan batin adalah hubungan yang tidak formil, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat, walau tidak nyata harus ada karena tanpa adanya ikatan batin, ikatan lahir menjadi rapuh.³⁷ Di dalam hidup bersama ikatan lahir batin tercermin dengan adanya kerukunan hidup diantara pasangan suami isteri yang merupakan dasar dalam membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang didasarkan asas keTuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa pengertian perkawinan yang dirumuskan oleh Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengandung makna yang sangat mendalam. Perkawinan

³⁷ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, hlm 15

bukan hanya persoalan lahiriah saja tetapi juga persoalan batin yang didasarkan kepada ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Berdasarkan ketentuan Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) merumuskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu. Menelaah ketentuan pasal tersebut maka dapat dikatakan bahwa tidak ada suatu perkawinan yang dilakukan di luar agama dan kepercayaan yang diakui di Indonesia.

Secara umum menurut hukum agama perkawinan adalah suatu ikatan suci atau sakral antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga, berumah tangga berjalan baik sesuai dengan ajaran agama masing – masing. Apabila perkawinan dilihat dari segi hukum agama merupakan suatu ikatan rohani dan jasmani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut oleh kedua calon mempelai beserta keluarga kerabatnya.³⁸

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai “ perikatan Perdata “, tetapi juga merupakan “ perikatan adat “ dan sekaligus merupakan “ perikatan kekerabatan dan ketetanggaan “.

Perkawinan dalam arti “ perikatan adat “ ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan, seperti tentang kedudukan suami dan

³⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut perUndangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm 10

kedudukan isteri, begitu pula tentang kedudukan anak dan pengangkatan anak, kedudukan anak tertua, anak penerus keturunan, anak adat, anak asuh dan lain – lain, dan harta perkawinan, yaitu harta yang timbul akibat terjadinya perkawinan, tergantung pada bentuk dan sistem perkawinan adat setempat.

Tiga bentuk perkawinan menurut hukum adat di Indonesia yaitu :³⁹

1. Perkawinan jujur

Pelamaran dilakukan oleh pihak pria kepada pihak wanita dan setelah perkawinan isteri mengikuti tempat kedudukan dan kediaman suami ;

2. Perkawinan semenda

Pelamaran dilakukan oleh pihak wanita kepada pihak pria dan setelah perkawinan suami mengikuti tempat kedudukan dan kediaman isteri ;

3. Perkawinan bebas

Pelamaran dilakukan oleh pihak pria dan setelah perkawinan kedua suami isteri bebas menentukan tempat kedudukan dan kediaman mereka, menurut kehendak mereka.

Berdasarkan ketentuan Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur mengenai tata tertib adat yang harus

³⁹ *ibid*, hlm 9

dilakukan oleh mereka yang akan melangsungkan perkawinan menurut bentuk dan sistem perkawinan yang berlaku dalam masyarakat. Hal mana berarti terserah kepada selera dan nilai – nilai budaya masyarakat yang bersangkutan, asal saja segala sesuatunya tidak bertentangan dengan kepentingan umum, Pancasila, dan Undang – undang Dasar 1945.

Perkawinan bagaikan tonggak penting dalam kehidupan seseorang, perkawinan bagi bangsa Tionghoa memiliki banyak adat istiadat dan perayaan yang rumit dan banyak diantaranya yang masih dipraktikkan hingga sekarang. Perkawinan diatur oleh orang tua dan dirancang oleh perantara atau makcomblang, anak – anak tidak berhak bicara. Persiapan perkawinan di mulai ketika sebuah keluarga mengirim seorang perantara atau makcomblang ke keluarga lain dengan membawa lamaran perkawinan, dimana keputusan terakhir ada di tangan orang tua.

Perkawinan wanita Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa dengan pria Taiwan di Kota Jambi telah dijadikan ajang bisnis sejumlah pihak, dimana hal ini bertentangan dengan tujuan perkawinan yang diatur dalam Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan tersebut hanya dapat tercapai apabila suatu perkawinan didasarkan atas rasa cinta kasih dan saling hormat menghormati antara pasangan suami isteri.

Adapun pihak yang paling diuntungkan dalam perkawinan ini adalah para perantara yang dikenal dengan istilah makcomblang. Sedangkan pihak wanita sebagai pelaku perkawinan berada diposisi yang lemah, padahal

dengan menyatakan kesanggupan untuk diperisteri dengan pria Taiwan, si wanita menanggung konsekuensi untuk dipisahkan dari lingkungan keluarga, masyarakat dan budaya yang selama ini dikenalnya.

Perantara atau makcomblang memiliki jaringan yang cukup luas baik di Kota Jambi maupun di Negara Taiwan, mereka dapat mengkondisikan keadaan tersebut menjadi sedemikian rupa, sehingga setiap pria Taiwan yang mencari isteri di Kota Jambi haruslah berhubungan dengan perantara atau makcomblang, sebaliknya bila ada Wanita warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa yang berniat diperisteri oleh pria Taiwan, juga harus melalui jasa dari perantara atau makcomblang.

Adapun cara yang dilakukan oleh Perantara atau makcomblang untuk mempengaruhi pihak keluarga wanita agar merelakan anak gadisnya untuk dijodohkan dengan Pria Taiwan adalah dengan memberikan janji atau iming - iming sejumlah uang yang akan dikirim oleh anak gadisnya mereka setelah menikah dengan pria Taiwan kaya, hal itu dibuktikan oleh tetangga – tetangga mereka yang telah lebih dahulu melakukan perkawinan tersebut dengan memiliki rumah yang besar dan berbagai barang mewah.

Ada sejumlah kawasan atau tempat yang dijadikan lokasi pertemuan rutin untuk saling mengenal satu sama lain antara para amoi (sebutan untuk gadis keturunan Tionghoa) dengan pria Taiwan yang terjadi di Kota Jambi. Pertemuan informal tersebut biasanya dilakukan di Hotel – hotel seperti Hotel Novotel Jambi dan Hotel Abadi Jambi. Dalam pertemuan ini komunikasi hanya menggunakan bahasa isyarat dan jika menginginkan sesuatu mesti

melalui jasa penterjemah yang tidak lain adalah para perantara atau makcomblang.

Apabila dalam pertemuan itu diantara mereka saling tertarik satu sama lain, maka akan dirundingkan masalah harga dan harga tersebut di luar biaya keberangkatan dari Kota Jambi, kemudian biaya penginapan di Jakarta sampai ke Taiwan. Biasanya para pria Taiwan yang ingin memperisteri wanita Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa kota Jambi memiliki tarif standar yang telah ditetapkan minimal Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) bahkan ada harga yang mencapai Rp. 150.000.000,- (seratus limapuluh juta rupiah) untuk harga tersebut masih di luar dari biaya mengurus paspor dan biaya jasa lainnya. Sementara untuk orang tua si amoi atau wanita juga akan mendapat uang tunai minimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai tanda jadi bahwa orang tua si amoi atau wanita telah setuju atas perundingan tersebut. Selain itu dalam perjanjian disebutkan kewajiban bagi si pria Taiwan untuk setiap bulannya mesti mengirim uang kepada orang tua si amoi atau wanita yang nilai nominal dalam bentuk rupiah. Setelah perundingan selesai dibicarakan maka bila ada kecocokan antara si wanita (amoi) dengan pria Taiwan tak jarang pria Taiwan langsung mengajak tidur bersama jika si wanita (amoi) bersedia dan orang tua si wanita (amoi) pun ikut setuju asalkan semua urusan dapat dilaksanakan secepatnya.⁴⁰

Setelah terjadi kesepakatan harga antara para pihak maka dapatlah dilakukan upacara perkawinan yang bertujuan untuk mengesahkan hubungan menjadi pasangan suami isteri.

⁴⁰ Wawancara dengan Lim Jok Seng, perantara atau makcomblang, tanggal 21 Oktober 2008

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hazairin,SH. Pegawai Catatan Sipil kota Jambi mengatakan bahwa perkawinan antara wanita Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa dengan pria Taiwan di Kota Jambi banyak dilakukan di bawah tangan, hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat khususnya Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa kota Jambi, tentang pentingnya mencatatkan perkawinan mereka sebagai bukti otentik telah terjadinya perkawinan.⁴¹

Bapak Hazairin, SH. Menambahkan, pencatatan perkawinan itu diadakan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat karena dapat diketahui dalam akta nikah, sehingga sewaktu – waktu dapat dipergunakan terutama sebagai alat bukti tertulis yang otentik. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 2 ayat (2) Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu : “ tiap – tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku “.

Dalam kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat khususnya Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa, mereka lebih cenderung untuk tidak mencatatkan perkawinannya. Menurut para responden hal ini disebabkan karena rumit atau sulitnya untuk memenuhi syarat administrasi dalam pencatatan perkawinan, sehingga mereka lebih memilih melakukan

⁴¹ *Wawancara dengan Bapak Hazairin, SH. Pegawai Catatan Sipil Kota Jambi, tanggal 21 Oktober 2008*

perkawinan di bawah tangan atau yang dikenal dengan istilah “ kawin photo”.⁴²

Perkawinan tersebut biasanya dilakukan di rumah si wanita (amoi), ada di hotel – hotel dan di kelenteng setempat dan perkawinan dilakukan menurut adat Tionghoa biasanya dipimpin oleh Louya (seperti Rahib / Pendeta). Perkawinan tersebut dihadiri oleh keluarga si wanita, perantara (makcomblang) dan sepasang calon suami isteri, pelaksanaan upacara perkawinan tidak terlalu berbelit – belit biasanya hanya minum arak / teh saja.

Berikut ini adalah nama – nama pasangan yang menjadi responden dalam penelitian ini :

TABEL 6
PASANGAN YANG MELAKUKAN PERKAWINAN
MELALUI PESANAN

NO	NAMA PASANGAN	TAHUN MENIKAH
1	NG Siau Phing alias Yeni dengan Lie A man	2003
2	Lie Cen Cen alias Yulia dengan Yap Pui Hok	2003
3	Lim A Pui alias Diana dengan O Lie Tiong	2004
4	Tan So Ceng alias Lili Wijaya dengan Lim A Thiam	2005
5	Ong Mei chen alias Imelda dengan Tan A Kang	2007

⁴² *Kesimpulan wawancara dengan para responden, tanggal 22 Oktober 2008*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Romo Pandita Muda Drs. Putu Natih, wakil ketua Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia Provinsi Jambi mengatakan belum pernah ada perkawinan yang dilakukan oleh Wanita Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa dengan Pria Taiwan yang dicatatkan atau dilakukan di Vihara.⁴³

3. kedudukan dan akibat hukum dari perkawinan antara wanita Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa dengan pria Taiwan melalui perantara

3.1. Kedudukan hukum perkawinan antara wanita Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa dengan pria Taiwan melalui perantara.

Perkawinan merupakan suatu proses alami dalam perjalanan hidup manusia dan perkawinan merupakan sebuah anugrah dari sang Pencipta karena dua insan yang awalnya berbeda berhasil disatukan untuk selamanya menjaga keutuhan agar semakin menuju lebih sempurna. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan kebebasan bagi setiap Warga Negara Indonesia untuk menyelenggarakan perkawinan baik menurut agama atau adat istiadatnya masing – masing.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan dengan tegas bahwa perkawinan adalah sah,

⁴³ Wawancara dengan Romo Pandita Muda Drs. Putu Natih, wakil ketua Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia Provinsi Jambi, tanggal 22 Oktober 2008

apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan dalam ayat (2) berbunyi bahwa tiap – tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan untuk saat ini masih terdapat 2 (dua) pendapat yang berbeda mengenai Kata “ masing – masing agama dan kepercayaannya itu “.

a. pendapat pertama

Pendapat pertama yang berasal dari penguasa / pemerintah termasuk unsur kantor catatan sipil yang berpendapat bahwa “ agama dan kepercayaan “ itu merupakan satu pengertian yaitu agama saja. Akibatnya perkawinan hanya sah apabila dilakukan menurut hukum agama yang diakui pemerintah (berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 477 Tahun 1978).

b. pendapat Kedua

pendapat kedua menyatakan bahwa “agama dan kepercayaan” itu mempunyai dua pengertian, adapun yang menjadi dasar hukumnya adalah :

1. Sejarah pembentukan Pasal 2 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Bahwa di dalam Pasal 2 Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak memberi tempat bagi mereka yang menikah di luar 5 (lima) agama, jadi Pasal 2 Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menutup

kemungkinan melangsungkan perkawinan menurut aliran kepercayaan dan menurut hukum adat.

2. Hukum Positif Indonesia

Di dalam Pancasila sila ke - 1, makna ke Tuhanan Yang Maha Esa adalah Ketaqwaan masyarakat Indonesia kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan sila ke -1 tidak harus dilaksanakan menurut salah satu agama yang diakui pemerintah jadi yang dilarang di Indonesia adalah jika ada orang yang tidak bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 29 ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945, Negara berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa. Dari ketentuan tersebut bahwa yang tersurat adalah berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa.

3. GBHN 1978

Di dalam GBHN telah memberi hidup atau tempat kepada para penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, meskipun di dalam GBHN tersebut dimaksudkan sebagai budaya dan jika hal ini dilakukan terus menerus menjadi suatu kebiasaan maka mempunyai kekuatan mengikat.

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan syarat – syarat perkawinan agar dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah dan haruslah dipenuhi oleh para pihak, adalah :

1. syarat Materil, yaitu syarat yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan yang berkaitan dengan diri yang bersangkutan, syarat materil dibedakan menjadi 2 (dua) :

- a. syarat materil mutlak, yang berlaku bagi semua orang, adalah :

1. didasarkan pada persetujuan bebas antara calon suami dan calon isteri, sehingga tidak ada unsur paksaan di dalam perkawinan;
 2. pria harus berumur 19 (sembilanbelas) tahun dan wanita berumur 16 (enambelas) tahun ;
 3. mendapatkan izin masing – masing dari kedua orang tua, kecuali calon pengantin telah berumur 21 (duapuluh satu) tahun atau lebih, atau mendapat izin pengadilan apabila umur calon kurang dari 19 (sembilan belas) tahun dan 16 (enambelas) tahun.
- b. syarat materil relatif, yang berwujud larangan – larangan dan berlaku untuk orang – orang tertentu, adalah :
1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau Ke atas ;
 2. berhubungan darah dalam garis keturunan ke samping, yaitu antara seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya ;
 3. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dengan ibu atau bapak tiri ;
 4. berhubungan saudara susuan, yaitu orang tua susuan dan bibi atau paman susuan ;
 5. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau keponakan dari isteri, dalam hal seseorang beristeri lebih dari seorang ;
 6. memiliki hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain

yang berlaku dilarang kawin ;

7. seseorang yang terikat tali pertalian dengan orang lain, kecuali dispensasi oleh pengadilan ;

8. seseorang yang telah cerai untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing – masing agama dan kepercayaan dari yang bersangkutan menentukan lain ;

9. seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau waktu tunggu.

2. syarat formal, yaitu mengenai tata cara pelaksanaan perkawinan dan pemberitahuan sampai dikeluarkannya akta perkawinan, terdiri dari :

a. setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan

memberitahukan kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan

akan dilangsungkan (Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) ;

b. pemberitahuan harus dilakukan sekurang – kurangnya 10 (

sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan (Pasal 3 ayat

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) ;

c. pemberitahuan dapat dilakukan oleh calon mempelai atau orang

tua atau wakilnya (kuasa) dengan secara lisan / tertulis (Pasal

4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) ;

d. perkawinan harus dilangsungkan menurut tata cara perkawinan yang

diatur oleh peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

peraturan pelaksana Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang pencatatan, nikah, talak dan rujuk.

Pencatatan perkawinan dalam pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan Menteri Agama Nomor 3 dan 4 Tahun 1975 bab II Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pencatatan perkawinan dari mereka yang melaksanakan perkawinan menurut Agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk. Sedangkan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya itu selain Agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat pada kantor catatan sipil diwilayah hukum mereka menikah atau berdomisili, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁴⁴

Peraturan catatan sipil yang berlaku hingga saat ini sebagian besar masih merupakan peninggalan zaman penjajahan Belanda antara lain : Staatblad 1849 Nomor 81 maupun Staatblad 1921 Nomor 751 jo. Staatblad 1927 Nomor 564, serta Staatblad 1933 Nomor 75, merupakan peraturan induk dari beberapa peraturan catatan sipil yang berlaku. Di dalam perkembangannya telah dikeluarkan keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang penataan dan peningkatan penyelenggaraan catatan sipil, yang

⁴⁴ Muhammad Ramulyo Idris, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm 197

dalam Pasal 5 ayat (2) dinyatakan bahwa fungsi catatan sipil adalah sebagai berikut :

1. sebagai penyelenggara pencatatan dan;
2. penertiban kutipan akta – akta tentang kelahiran, perkawinan, perceraian, pengakuan anak;
3. pengesahan anak serta akta kelahiran.

Dalam pasal 2 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku, sedangkan dalam Pasal 100 KUH Perdata berbunyi bahwa adanya suatu perkawinan tak dapat dibuktikan dengan cara lain, melainkan dengan akta perlangsungan perkawinan itu, yang telah dibukukan dalam register – register catatan sipil, kecuali dalam hal – hal teratur dalam Pasal – Pasal berikut. Adapun maksud dari ketentuan ini bahwa setiap perkawinan yang telah sah dilakukan menurut hukum masing - masing agamanya dan kepercayaannya itu, haruslah dicatatkan menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku dengan tujuan untuk memperoleh kepastian hukum atas peristiwa perkawinan seseorang.

Mengenai bahwa suatu perkawinan haruslah dicatatkan di lembaga pencatat perkawinan, diatur juga dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain Agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai

perundang – undangan mengenai pencatatan perkawinan. Adapun maksud dari ketentuan ini bahwa bagi para pihak yang bukan beragama Islam dalam memperoleh kepastian hukum dari peristiwa suatu perkawinan, pencatatan perkawinan dapat dilakukan pada pegawai pencatat perkawinan yaitu pada kantor catatan sipil setempat.

Berdasarkan penelitian di lapangan bahwa perkawinan antara wanita Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa dengan Pria Taiwan melalui perantara (mak comblang) yang dilakukan secara adat Tionghoa ternyata tidak dilakukan pencatatan perkawinan di kantor catatan sipil setempat diyakini oleh para pihak sebagai perkawinan yang sah, dan peristiwa ini mendapat pengakuan dari masyarakat yang juga mengakui perkawinan itu.

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mewajibkan bahwa setiap orang yang hendak melakukan perkawinan di Negara Indonesia haruslah mentaati setiap peraturan yang berlaku, demikian juga dalam hal perkawinan antara wanita Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa dengan Pria Taiwan yang dalam prakteknya ternyata tidak memenuhi semua persyaratan sebagai perkawinan yang sah menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Suatu perkawinan agar mendapat suatu kepastian hukum tidak hanya cukup dilakukan secara adat, agama / kepercayaan saja tetapi haruslah juga dilakukan pendaftaran di kantor catatan sipil setelah perkawinan dilakukan. Terhadap perkawinan wanita Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa dengan Pria Taiwan yang dilakukan dengan adat Tionghoa merupakan syarat materil yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang hendak melangsungkan

perkawinan yang berhubungan dengan diri yang bersangkutan yang telah dipenuhi oleh para pasangan suami isteri namun syarat formal mengenai tata cara pelaksanaan pencatatan perkawinan belum terpenuhi oleh para pasangan suami isteri.

Syarat formal yang merupakan bagian pendaftaran perkawinan berhubungan erat dengan akta perkawinan dimana masing – masing suami dan isteri akan diberikan kutipan akta perkawinan (pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975). Karena tanpa adanya bukti otentik berupa akta nikah dan akta kelahiran bagi anak – anak yang dilahirkan, maka para pasangan suami isteri dapat dikatakan melakukan “ kumpul kebo “ dan terhadap anak – anak yang dilakukan disebut sebagai anak luar nikah atau anak haram / zinah.

Oleh karena itu perkawinan antara wanita Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa dengan Pria Taiwan yang dilakukan secara adat Tionghoa tanpa dilakukan pencatatan perkawinan di kantor catatan sipil secara yuridis belum sah, karena Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menghendaki agar kedua syarat baik syarat materil dan syarat formal dapat dipenuhi oleh para pasangan suami isteri. Walaupun secara adat perkawinan tersebut sah tetapi secara hukum / yuridis, perkawinan tersebut belum sah karena yang berlaku di Negara Indonesia adalah hukum Negara bukanlah hukum adat. Sedangkan perkawinan wanita Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa dengan Pria Taiwan belum dapat memenuhi kedua syarat yang telah ditentukan.

Perkawinan antara wanita Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa dengan Pria Taiwan merupakan perkawinan yang keduanya berasal dari warga Negara yang berbeda, namun terhadap mereka tidak dapat disebut melakukan perkawinan campuran, karena belum memenuhi syarat – syarat yang telah ditetapkan oleh Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Di dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pengertian perkawinan campuran diatur dalam ketentuan Pasal 57 yang menentukan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah “ perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia “. Ketentuan Pasal 57 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menunjukkan bahwa Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memberikan pembatasan mengenai perkawinan campuran hanya mengatur perkawinan antara seorang Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing saja.

Pasal 59 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan secara pokok bahwa “ Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang – Undang Perkawinan ini “. Menelaah ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, merupakan kaedah petunjuk untuk sahnyanya suatu perkawinan campuran yang dilakukan di Indonesia mengenai sahnyanya perkawinan campuran sepenuhnya diserahkan kepada hukum perkawinan dimaksud perkawinan campuran itu dilakukan.

Di dalam ketentuan Pasal 60 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditentukan bahwa “ Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat – syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing – masing telah dipenuhi “. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dijabarkan lebih lanjut, bahwa perkawinan campuran antar Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing hanya dapat dilangsungkan bila syarat – syarat perkawinan yang ditentukan dalam hukum yang terdapat dalam Negara masing – masing pihak terpenuhi.

Sedangkan inti dari Pasal 60 ayat (1) berbunyi bahwa bagi mereka yang telah melakukan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing – masing berwenang mencatat perkawinan.

Pencatatan perkawinan campuran yang dimaksud menurut ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah:

1. bagi yang beragama islam, pegawai pencatat yang berwenang adalah pegawai pencatat nikah atau pembantu pegawai pencatat nikah Talak Cerai Rujuk.
2. bagi yang bukan beragama islam, pegawai pencatat yang berwenang adalah pegawai Kantor Catatan Sipil.

Pihak Warga Negara Indonesia, harus memenuhi syarat – syarat materil maupun formil yang telah ditentukan dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975 sebagai peraturan pelaksanaannya. Syarat yang harus dipenuhi bagi pihak yang berkewarganegaraan asing yang akan menyelenggarakan perkawinan dengan orang Indonesia adalah syarat – syarat yang ditentukan oleh hukum negara asalnya. Syarat – syarat tersebut antara lain menyangkut perkawinan, kewenangan untuk melakukan perkawinan serta hal lain yang telah ditentukan oleh negaranya untuk dapat melangsungkan perkawinan.

Disamping itu telah dipenuhinya syarat – syarat perkawinan bagi masing – masing pihak, dalam ketentuan Pasal 2 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga ditentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu, ketentuan Pasal 2 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diberlakukan pula bagi perkawinan campuran.

Menelaah dari ketentuan – ketentuan di atas bahwa perkawinan antara Wanita Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa dengan Pria Taiwan bukanlah suatu perkawinan campuran karena para pasangan suami isteri belum memenuhi syarat – syarat yang telah ditetapkan oleh Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

3.2. Perlindungan Hukum Terhadap perkawinan antara Wanita Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa dengan Pria Taiwan

Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk

keluarga (rumah tangga) yang kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa.

Apabila pengertian perkawinan menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dibandingkan dengan pengertian perkawinan yang terdapat dalam kitab Undang – Undang Hukum Perdata, maka ada perbedaan yang prinsipil. Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah persatuan seorang pria dengan wanita secara hukum untuk hidup bersama – sama. Hidup bersama ini dimaksudkan untuk berlangsung selama – lamanya.⁴⁵

Perkawinan antara Wanita Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa dengan Pria Taiwan memang sangat menjanjikan karena dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga si wanita karena para pria Taiwan pada umumnya berasal dari orang yang mampu secara materi. Namun tidak semuanya para wanita Warga Negara Indonesia yang menjadi korban penipuan oleh perantara dan pria Taiwan.

Mengenai keberadaan dari perantara atau makcomblang sebagai pihak perantara yang mempertemukan antara wanita Warga Negara Indonesia dengan Pria Taiwan dan sebagai pihak yang memperoleh keuntungan dari perkawinan para pihak, berikut ini adalah wawancara dengan Abdullah Harris, SH. M.Hum (pengacara):

⁴⁵ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm 95

“ Mengatakan bahwa keberadaan dari agen tersebut di mata hukum tidak dapat dikatakan legal atau illegal karena belum ada hukum yang mengaturnya. Beliau menambahkan karena kebanyakan si wanita berasal dari keluarga kurang mampu jadi semata – mata adalah motif ekonomi, dan mereka tidak mengerti mengenai hukum dan masalah mekanisme serta urusan administrasi akibatnya tidak jarang si wanita menjadi korban penipuan antara perantara atau makcomblang bersama pria Taiwan”.⁴⁶

Adapun penipuan – penipuan sering terjadi yang dialami oleh para amoi Kota Jambi misalnya masalah Paspor, dimana ketika sampai ke Taiwan si wanita baru sadar bahwa paspor yang ia gunakan adalah paspor palsu, dan lebih menyedihkan lagi para amoi ada dijadikan sebagai sarana pemuas seks sejumlah pihak dan untuk selanjutnya dijabloskan ke dunia portitusi sehingga sangat sulit bagi mereka untuk meloloskan diri. Bahkan ada dari mereka yang sampai ke Taiwan ditipu kemudian ditelantarkan begitu saja dan untuk memenuhi kehidupan mereka disana ada yang terpaksa bekerja di club malam untuk dijadikan wanita penghibur. Ironisnya setiap kali terungkapnya masalah ini ke permukaan baik adanya pelaporan dari korban dan keluarga korban, pihak – pihak yang terlibat dalam pengiriman si amoi ke Taiwan, terutama perantara atau makcomblang belum pernah diproses secara hukum dalam arti bahwa perantara atau makcomblang ini tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kasus tersebut.⁴⁷

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Abdullah Harris, pengacara kota Jambi, tanggal 20 Oktober 2008.

⁴⁷ Sumber: Hasil Wawancara dengan Chen Hui Chien, perantara atau makcomblang, tanggal 21 oktober 2008.

Menurut bapak B. Simanjuntak, SH, selaku Kepala Bagian Perdata dari Pengadilan Negeri Jambi :

“mengatakan pada umumnya para wanita Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa, ketika timbulnya ketidakcocokan antara suami dengan isteri dan menuju pada perceraian maka para wanita tersebut cenderung memilih untuk pulang ke Jambi tanpa melalui proses hukum perceraian di negara Taiwan. Akibat dari perceraian ini para wanita Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa merasa dirugikan, karena untuk pembagian dari harta bersama akibat dari perceraian tersebut si isteri tidak mendapatkan harta bersama, dan untuk kepemilikan anak akan jatuh ketangan si suami.”⁴⁸

Bapak B. Simanjuntak, SH, menambahkan selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir yaitu dari tahun 1998 – 2008 belum pernah terjadi penyelesaian kasus perceraian yang dilakukan antara wanita Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa dengan Pria Taiwan yang diselesaikan di Pengadilan Negeri Jambi.

Dengan berbagai kasus perkawinan yang terjadi antara wanita Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa dengan Pria Taiwan melalui perantara (makcomblang) yang lebih – lebih telah merugikan si wanita karena si Wanita Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa ketika sampai di negara Taiwan mereka akan berada pada posisi yang sangat lemah, karena berada di bawah kekuasaan pria Taiwan dan perantara (makcomblang), karena harus patuh dan tunduk, dan hal ini dimanfaatkan oleh perantara (makcomblang) dari si

⁴⁸ Sumber : Hasil Wawancara dengan B. Simanjuntak, Kabag Perdata PN Jambi, tanggal 27 oktober 2008.

wanita untuk mendatangkan keuntungan bagi mereka seperti halnya mereka dipekerjakan ditempat – tempat hiburan malam.

Salah satu dari kelemahan dari perkawinan antara wanita Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa dengan pria Taiwan melalui perantara (makcomblang) yang terjadi di kota Jambi adalah tidak adanya perlindungan hukum bagi si wanita apabila mereka tiba di negara Taiwan, dan pihak perantara (makcomblang) sebagai pihak perantara yang mempertemukan diantara pihak pun tidak dapat diminta pertanggung jawaban apabila si wanita Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa menjadi korban penipuan setibanya di negara Taiwan.

Pemerintah kota Jambi dalam menanggapi berbagai kasus yang terjadi sekian lama yang telah menimpa warganya sampai saat ini pun tidak dapat berbuat banyak, dikarenakan pemerintah kota Jambi belum memiliki seperangkat peraturan Daerah yang mengatur tentang Perkawinan antara Wanita Warga Negara Indonesia dengan orang asing khususnya orang Taiwan, sehingga pemerintah Kota Jambi tidak dapat mencegah praktek perkawinan tersebut dan melindungi warganya yang menjadi korban penipuan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, bahwa terhadap para wanita Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa yang melakukan perkawinan dengan pria Taiwan melalui perantara (makcomblang), saat ini belum adanya jaminan perlindungan hukum bagi wanita Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa apabila keberadaan mereka dimanfaatkan oleh para perantara (makcomblang) dan pria Taiwan yang tidak bertanggung jawab, yang

berusaha memanfaatkan untuk memperoleh keuntungan dari para wanita Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa, yang berada pada posisi yang sangat lemah karena di bawah kekuasaan para perantara (makcomblang) dan pria Taiwan.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkawinan antara Wanita Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa dengan pria Taiwan yang pada umumnya dilakukan menurut adat Tionghoa secara dibawah tangan, secara adat adalah perkawinan yang sah tetapi secara yuridis perkawinan tersebut belum sah karena syarat formal yang mewajibkan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan di kantor catatan sipil setempat belum dapat dipenuhi oleh para pasangan. sehingga bagi para pasangan suami – isteri belum dapat disebut sebagai perkawinan campuran karena syarat – syarat yang ditetapkan oleh Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum dapat dipenuhi.
2. Bagi Wanita Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa yang melakukan perkawinan dengan pria Taiwan melalui perantara (makcomblang) ternyata belum ada suatu perlindungan hukum bagi para wanita Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa, terutama dalam hal pembagian harta perkawinan (harta gono gini) dan hak asuh anak, apabila mereka menjadi korban penipuan oleh perantara (makcomblang) dan pria Taiwan yang tidak bertanggung jawab.

2. Saran – Saran

1. Saat ini Pemerintah kota Jambi, tidak memiliki data secara pasti berapa jumlah Wanita Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa (amoi) Kota Jambi yang terlibat dalam perkawinan dengan Pria Taiwan. Adapun cara mengatasinya sudah saatnya Pemerintah Kota Jambi, membuat suatu peraturan khusus tentang perkawinan warganya dengan pria asing khususnya pria Taiwan, sehingga adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum akibat dari perkawinan tersebut. Begitu juga dengan keberadaan para perantara (makcomblang) yang meraup keuntungan dari perkawinan tersebut, yang dinilai merupakan penjualan wanita secara terselubung.
2. Perkawinan merupakan kebebasan setiap individu, namun peranan pemerintah dalam pengaturannya sangat diperlukan. Untuk para wanita Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa (amoi) Kota Jambi, agar lebih berhati – hati dan selektif dalam memilih pasangan hidup, karena fakta menunjukkan tidak semuanya perkawinan dapat berjalan dengan baik bahkan ada yang menjadi korban penipuan. Program penyuluhan yang memadai perlu dilakukan oleh instansi pemerintah terkait maupun lembaga masyarakat yang peduli terhadap kehidupan kaum perempuan, yang ditujukan kepada para perantara (makcomblang) dan masyarakat Jambi khususnya wanita keturunan Tionghoa, mengenai akibat hukum yang akan timbul jika tidak mencatatkan perkawinan yang dilakukan.

3. Kepada Petugas Imigrasi untuk lebih selektif dalam mengeluarkan Paspor, sehingga memperkecil resiko terjadinya Penipuan atau pemalsuan identitas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku - buku

Abdurrahman dan Riduan Syahrani, 1978, *Hukum Perkawinan*, Alumni, Bandung.

- _____, 1978, *Masalah – masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Al Purwa Hadiwardoyo, 1990, *Perkawinan Menurut Islam dan Katolik Implikasi Dalam Kawin Campur*, Kanisius, Yogyakarta.
- Ali Afandi, *Hukum Waris*, 2004, *Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Altherton & klemmack dan Irawan Soehartono, 1999, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Anly Cenggana, 1998, *Aspek Hukum Pencatatan Perkawinan Secara Agama Konghucu*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- H.B Sutopo, 1988, *Metodologi Penelitian Kualitatif Bagian II*, UNS Press, Surakarta.
- Hilman Hadikusuma, 1977, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung.
- _____, 1980, *Pokok – pokok Pengertian Hukum Adat*, Alumni, Bandung.
- _____, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut perUndangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, 1993, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Koentjaraningrat, 1983, *Manusia dan Kebudayaan Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- K. Wantjik Saleh, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Li xiao xiang dan Fu chun jiang, 2003, *Orging of Chinese people and custom, asal mula budaya dan Bangsa Tionghoa*, PT. Elex Media Komputindo kelompok Gramedia, Jakarta.
- Mulyadi, 2008, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ronny Hanitjo Soemitro, 1990, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Yumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soedaryo Soimin, 2001, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1986 , *Pengantar penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

_____ dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta.

Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 1986, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

_____,1998, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.

Sugiono, 2001, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.

Suteki, 2007, *Hak Atas Air (di Tengah Liberalisasi Hukum dan Ekonomi dalam Kesejahteraan)*, Pustaka Magister Kenotariatan, Semarang.

Sutrisno Hadi, 2001, *Metodologi Riset Nasional*. PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Tan Thong Kie, 2007, *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.

Ter Haar, 1979, *Beginselen en stelsel Van het adatrecht, diterjemahkan oleh soebekti dalam Asas – Asas dan susunan Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Peraturan perundang – undangan

Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Peraturan Pelaksana Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974

**PELAKSANAAN PERKAWINAN ANTARA WANITA
WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN TIONGHOA DENGAN
PRIA TAIWAN MELALUI PERANTARA DAN AKIBAT HUKUMNYA
DI KOTA JAMBI**

A. Latar Belakang

Ada fenomena yang terjadi pada masyarakat Kota Jambi yaitu mengenai Perkawinan antara Wanita WNI keturunan Tionghoa dengan pria Taiwan, melalui perantara (makcomblang).

Faktor yang menyebabkan terjadi perkawinan:

- 1. Biaya yang mahal di Negara Taiwan**
- 2. Larangan untuk kawin bagi tentara yang aktif di Taiwan**
- 3. Faktor ekonomi**

Perkawinan yang telah dilaksanakan di bawah tangan secara adat Tionghoa, ada sebagian yang didaftarkan di kantor catatan sipil untuk mendapatkan pengesahan pernikahan dan ada yang tidak didaftarkan.

B. Perumusan Masalah

3. Bagaimanakah pelaksanaan perkawinan antara wanita Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa dengan pria Taiwan melalui perantara ?

4. Bagaimanakah kedudukan dan akibat hukum dari perkawinan antara wanita Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa dengan pria Taiwan melalui perantara ?

C. Tujuan penelitian

3. Untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan antara wanita Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa dengan pria Taiwan melalui perantara.
4. Untuk mengetahui kedudukan dan akibat hukum dari perkawinan antara wanita Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa dengan pria Taiwan melalui perantara.

D. Metode penelitian

1. Metode pendekatan

Penelitian yuridis empiris dilakukan dengan cara meneliti di lapangan dengan cara wawancara dengan responden, yang menjelaskan situasi serta Hukum yang terjadi dan berlaku dalam masyarakat secara menyeluruh, sistematis, faktual, dan akurat.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.

3. Teknik Penentuan Sampel

Teknik penarikan sampel adalah teknik Purposive sampling (non random sampling) maksud dari digunakannya teknik ini agar diperoleh subyek – subyek yang ditunjuk sesuai dengan tujuan penelitian.

yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah: perantara / makcomblang, orang tua wanita dan wanita yang melakukan perkawinan tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dapat digolongkan menjadi **dua** antara lain :

a. **Data primer,**

Wawancara dengan responden.

b. **Data sekunder,**

yaitu penelitian kepustakaan yang memiliki tujuan mencari, mempelajari dan mengumpulkan data sekunder yang berhubungan dengan obyek penelitian dengan melakukan studi dokumen terhadap buku – buku, literatur, perundang – undangan, dan dokumen

E. Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan perkawinan antara wanita WNI keturunan Tionghoa dengan pria Taiwan melalui prantara (makcomblang) di kota Jambi pada umumnya

dilakukan di bawah tangan atau dikenal dengan “ kawin photo”, yaitu di rumah wanita, hotel, atau klenteng. Hal ini disebabkan masih kurangnya pengetahuan masyarakat keturunan Tionghoa di kota Jambi mengenai pentingnya mencatatkan perkawinannya. Serta rumit atau sulitnya untuk memenuhi syarat administrasi.

2. Belum ada jaminan perlindungan hukum bagi wanita WNI keturunan Tionghoa terhadap harta bersama dan hak asuh anak.

F. saran - saran

1. Saat ini Pemerintah kota Jambi, tidak memiliki data secara pasti berapa jumlah Wanita Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa (amoi) Kota Jambi yang terlibat dalam perkawinan dengan Pria Taiwan. Adapun cara mengatasinya sudah saatnya Pemerintah Kota Jambi, membuat suatu peraturan khusus tentang perkawinan warganya dengan pria asing khususnya pria Taiwan, sehingga adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum akibat dari perkawinan tersebut. Begitu juga dengan keberadaan para perantara (makcomblang) yang meraup keuntungan dari perkawinan tersebut, yang dinilai merupakan penjualan wanita secara terselubung.
2. Perkawinan merupakan kebebasan setiap individu, namun peranan pemerintah dalam pengaturannya sangat diperlukan. Untuk para wanita Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa (amoi) Kota Jambi, agar lebih berhati – hati dan selektif dalam memilih pasangan hidup, karena fakta

menunjukkan tidak semuanya perkawinan dapat berjalan dengan baik bahkan ada yang menjadi korban penipuan. Program penyuluhan yang memadai perlu dilakukan oleh instansi pemerintah terkait maupun lembaga masyarakat yang peduli terhadap kehidupan kaum perempuan.

